



**PENGARUH MACHIAVELLIAN, TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN DANA PAJAK,
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN STATUS SOSIAL
EKONOMI TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

Skripsi

Oleh:

Moh. Azhar Awaludin

NPM : 4316500113

Diajukan Kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2021



**PENGARUH MACHIAVELLIAN, TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN DANA PAJAK,
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN STATUS SOSIAL
EKONOMI TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal

Oleh:

Moh. Azhar Awaludin

NPM : 4316500113

Diajukan Kepada :

Program Studi Akuntansi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal

2021



PENGARUH MACHIAVELLIAN, TEKNOLOGI INFORMASI
PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN DANA PAJAK,
KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN STATUS SOSIAL
EKONOMI TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK

Skripsi

Oleh :

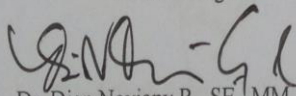
Mohamad Azhar Awaludin

NPM : 4316500113

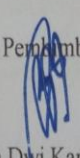
Disetujui Untuk Ujian Skripsi

Hari/Tanggal : Sabtu, 24 Juli 2021

Pembimbing I

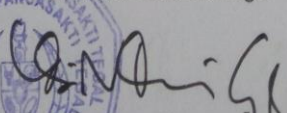

Dr. Dien Noviany R., SE., MM, Akt
NIDN. 0628117502

Pembimbing II


Maulida Dwi Kartika, S.E, M.Si
NIDN. 0620038901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasakti Tegal


Dr. Dien Noviany R., SE., MM, Akt
NIDN. 0628117502

Pengesahan Skripsi

Pengesahan Skripsi

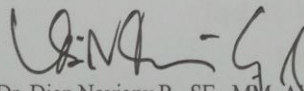
Nama : Mohamad Azhar Awaludin
NPM : 4316500113
Judul : Pengaruh Machiavellian, Teknologi Informasi Perpajakan,
Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak, Kepercayaan Kepada
Pemerintah dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika
Penggelapan Pajak.

Telah diuji dan dinyatakan lulus dalam ujian skripsi, yang dilaksanakan pada:

Hari : Sabtu

Tanggal : 24 Juli 2021

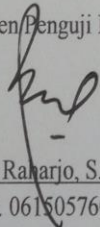
Ketua Penguji



Dr. Dien Noviany R., SE., MM, Akt

NIDN. 0628117502

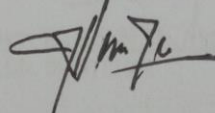
Dosen/Penguji I



Teguh Budi Raharjo, S.E., M.M

NIDN. 0615057601

Dosen/Penguji II



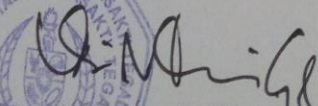
Abdullah Mubarak, S.E., M.M, Akt

NIDN. 0331077302

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Pancasakti Tegal



Dr. Dien Noviany R., SE., MM, Akt

NIDN. 0628117502

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Menjadi lebih baik di setiap langkah”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku Bapak Maman Suherman dan Ibu Sri Rahayu yang senantiasa selalu memberikan semangat, doa, motivasi serta kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan pada penulis untuk mencapai kesuksesan dan mimpinya.
2. Adik-adikku Mohamad Hamzah Nur Faizal dan Rahma Aulia Zahra yang telah memberikan doa dan dukungannya.
3. Paman dan Bibi saya Kisbiyanto dan Tita Supartini yang telah membantu saya dalam hal fasilitas berupa peminjaman laptop selama saya mengerjakan skripsi.
4. Teman-teman dan sahabat saya Remvong Family, keluarga akuntansi D dan Bayu Akbar yang selalu memberikan dukungan dan doa.
5. Almamaterku.

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mohamad Azhar Awaludin

NPM : 4316500113

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Perpajakan

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul :

“ Pengaruh Machiavellian, Teknologi Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak”

1. Merupakan hasil karya sendiri, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti plagiasi, manipulasi dan / atau pemalsuan data maupun bentuk-bentuk kecurangan yang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Pancasakti Tegal.
2. Saya mengijinkan untuk dikelola oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal sesuai dengan norma hukum dan etika yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggungjawab.

Tegal,

... atakan,

METERAI TEMPEL
2F31AJX342743092
Monanau Azhar Awaludin

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Machiavellian, Teknologi Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Populasi sebesar 171.767 wajib pajak, dengan teknik pengambilan sampel *Aksidental sampling*. Dari metode tersebut diperoleh sampel sebesar 100 responden. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa analisis regresi linear berganda dengan program SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah dan variabel status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Sedangkan machiavellian, teknologi informasi perpajakan dan ketepatan pengalokasian dana pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Kata kunci : *Machiavellian, Teknologi Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah, Status Sosial Ekonomi, Persepsi Etika Penggelapan Pajak.*

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of Machiavellian, Tax Information Technology, Accuracy of Allocation of Tax Funds, Trust in Government and Socio-Economic Status on Perceptions of the Ethics of Tax evasion.

This type of research uses quantitative methods. The data used in this research is primary data. The population is 171,767 taxpayers, using accidental sampling technique. From this method obtained a sample of 100 respondents. The analysis used in this study is in the form of multiple linear regression analysis with the SPSS program.

The results of this study indicate that the variable of trust in the government and the variable of socioeconomic status have no effect on the ethical perception of tax evasion. While machiavellian, tax information technology and the accuracy of the allocation of tax funds affect the ethical perception of tax evasion.

Keywords: Machiavellian, Tax Information Technology, Accuracy of Tax Fund Allocation, Trust in Government, Socio-Economic Status, Perception of Tax Evasion Ethics.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta karuniaNya, sehingga penulits dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Shalawat serta salam selalu senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW yang telah mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan skripsi ini dilakukan guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Pancasakti Tegal.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini terutama kepada :

1. Kedua orang tua, ayahanda tercinta riyanto dan Alm Ibunda tersayang Sairoh yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta tidak lupa doa yang tiada henti-hentinya untuk saya.
2. Ibu Dr. Dien Noviany Rahmatika, SE.,MM.,Akt.,CA., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing , memberikan nasihat, saran, dan motivasi kepada saya.
3. Bapak Aminul Fajri, S.E.,M.Si.,Ak., selaku Ketua Program Studi

Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti
Tegal

4. Ibu Maulida Dwi Kartika, S.E.,M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang sudah Membimbing, memberikan nasihat,saran, dan motivasi kepada saya.
5. Paman saya, Kisbiyanto sekeluarga yang telah membantu saya dalam meminjamkan fasilitas leptop kepada saya.
6. Sahabat saya, Bayu Akbar yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.
7. Teman-teman Remvong Family dan teman-teman akuntansi D yang telah memberikan saya motivasi dan dukungan.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa proposal penelitian untuk skripsi ini memiliki banyak kekurangan. Maka penulis mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan proposal penelitian untuk skripsi ini.

Akhir kalam, saya sebagai penulis berharap proposal penelitian untuk skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Tegal,

Mohamad Azhar Awaludin

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
MOTO DAN PEMBAHASAN	iv
HALAMAN KEASLIAN DAN PERSETUJUAN PUBLIK.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Terdahulu	11
1. Theory Of Planned Behavior (TPB)	11

2. Technology Acceptance Modal (TAM)	13
3. Teori Atribusi	13
4. Teori Persepsi	14
5. Etika Penggelapan pajak	15
6. Machiavellian	18
7. Teknologi Informasi Perpajakan	19
8. Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak	20
9. Kepercayaan Kepada Pemerintah	21
10. Status Sosial Ekonomi	23
B. Penelitian Terdahulu	24
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Hipotesis	35
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Jenis Penelitian.....	37
B. Populasi dan Sampel.....	37
C. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel	39
D. Metode Pengumpulan Data.....	42
E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian.....	43
F. Metode Analisis Data	44
1. Statistik Deskriptif	45
2. Uji Asumsi Klasik.....	46
3. Analisis Linear Berganda	47
4. Uji Hipotesis	48
BAB IV HASILDAN PEMBAHASAN	51

A. Gambaran Umum	51
B. Hasil Penelitian.....	57
1. Analisis Karakteristik Responden.....	57
2. Analisis Data	61
C. Pembahasan	74
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
C. Keterbatasan	82
DAFTAR PUSTAKA	83

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak	3
1.2 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Menyampaikan SPT Tahunan KPP Pratama Kota Tegal	4
2.1 Penelitian Terdahulu	24
3.1 Operasioanal Variabel	40
4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	58
4.2 Karakteristik Responden Menurut Usia	58
4.3 Karakteristik Responden Menurut Pendidikan Terakhir	59
4.4 Karakteristik Responden Menurut Pekerjaan	60
4.5 Karakteristik Responden Menurut Lama Kepemilikan NPWP	60
4.6 Hasil Uji Validitas	61
4.7 Hasil Uji Reliabilitas	63
4.8 Hasil Uji Normalitas	64
4.9 Hasil Uji Multikolinearitas	65
4.10 Hasil Uji Heteroskeditas	66
4.11 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	67
4.12 Hasil Uji F	70
4.13 Hasil Uji t (Parsial)	71

4.14 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	74
--	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1.1 Kerangka Pemikiran.....	35
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
A. Output Uji Validitas	87
B. Output Uji Reliabilitas.....	94
C. Output Uji Normalitas	95
D. Output Uji Multikolinearitas dan Heteroskeditas	95
E. Output Uji Analisis Regresi Linear Berganda dan Uji T	95
F. Output Uji F.....	96
G. Output Uji Koefisien Determinasi	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu tujuan nasional yang tertera dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pembangunan nasional secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai wujud upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai negara berkembang, perekonomian negara tidak bisa lepas dari kebijakan ekonomi negara, dibutuhkan dana besar untuk membiayai kegiatan tersebut salah satunya berasal dari pajak. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa yang berdasarkan Undang-Undang perpajakan, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan dipergunakan untuk keperluan negara.

Pentingnya sektor pajak bagi pendapatan negara membuat pemerintah menyadari betul, sehingga setiap tahunnya pemerintah mengupayakan untuk selalu memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Menurut Sari (2015), dalam usaha memaksimalkan dan mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak di Indonesia dilakukanlah tindakan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak. Ekstensifikasi dilakukan dengan melakukan perluasan lingkup objek pajak. Sedangkan intensifikasi dapat dilalui dengan mengoptimalkan penerimaan pajak yang sudah ada dengan meningkatkan kualitas aparatur perpajakan (fiskus), pelayanan yang maksimal terhadap Wajib Pajak dan sosialisasi kepada

Wajib Pajak, pengawasan (*control*) administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta *law enforcement* atau penegakan hukum.

Direktorat Jendral Pajak merupakan sebuah instansi pemerintah sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia dibawah naungan Departemen Keuangan. Tugas dari Direktorat Jendral Pajak adalah memaksimalkan penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak dengan sistem yang lebih modern. Pemodernan sistem ini diharapkan para Wajib Pajak sadar akan kewajibannya, sehingga pendapatan negara atas sektor pajak dapat meningkat, dikarenakan besarnya jumlah Wajib Pajak potensial lebih condong untuk bertambah setiap tahunnya (Sari, 2015).

Realita yang terjadi di lapangan adalah masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya, ini disebabkan pola pikir wajib pajak yang masih menganggap uang yang mereka keluarkan untuk membayar pajak masih belum dirasakan sepenuhnya. Padahal untuk setiap tahunnya penerimaan dari sumber perpajakan selalu meningkat tetapi tidak pernah mencapai target yang ditetapkan. Ini terlihat dari penerimaan pajak lima tahun terakhir yang menunjukkan bahwa masih tidak stabilnya realisasi yang didapat dari tahun ke tahun. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan pajak tahun 2015-2019 :

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak

Tahun	Realisasi Penerimaan	Target Penerimaan	Persentase Penerimaan (%)
2015	1.060,83 triliun	1.294,26 triliun	81,60%
2016	1.105,73 triliun	1.355,20 triliun	81,59%
2017	1.151,03 triliun	1.283,57 triliun	89,67%
2018	1.315,51 triliun	1.424,00 triliun	92,24%
2019	1.332,66 triliun	1.577,56 triliun	84,48%

Sumber : www.kemenkeu.go.id

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir persentase penerimaan pajak di Indonesia mengalami fluktuatif dan dalam realisasi penerimaan pajak juga masih belum mencapai target penerimaan yang sudah ditentukan. Pada tahun 2017 telah terjadi lonjakan persentase penerimaan pajak mencapai 89,67% dari target penerimaan pajak. Pada tahun 2018, juga mengalami kenaikan sebesar 92,24%. Tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 7,76% menjadi 84,48%.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tegal merupakan kantor pelayanan pajak yang melakukan pelayanan di daerah Kota Tegal dan sekitarnya. Wardani (2020) berpendapat bahwa tidak melaporkan SPT merupakan salah satu indikator dari faktor penggelapan pajak. Fenomena atau peristiwa yang ada di KPP Pratama Kota Tegal patut diteliti, dikarenakan berdasarkan tinjauan pendahuluan yang telah peneliti lakukan terdapat cukup banyak wajib pajak yang tidak melaporkan SPT. Berikut data-data jumlah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan melaporkan

SPT di KPP Pratama Kota Tegal selama lima tahun terakhir.

Tabel 1.2

Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Menyampaikan SPT Tahunan KPP Pratama Kota Tegal

Tahun	Jumlah WP yang Terdaftar di SPT	Jumlah WP yang Melaporkan SPT	Persentase (%)
2015	138.912	80.406	57,88%
2016	159.087	86.212	54,19%
2017	128.077	88.623	69,20%
2018	150.922	94.526	62,53%
2019	171.767	85.239	49,62%

Sumber : KPP Pratama Kota Tegal (data diolah, 2019)

Berdasarkan dari data diatas menunjukkan bahwa adanya ketidakstabilan cenderung menurun dalam pelaporan SPT yang dilakukan wajib pajak orang pribadi. Pada tahun 2016, 2018, dan tahun 2019 terjadi penurunan terutama pada tahun 2019 yang mana terjadi penurunan tajam wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT nya sebesar 49,62%. Hal ini menandakan masih banyak wajib pajak orang pribadi yang tidak taat dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal perpajakan.

Kesadaran Wajib Pajak adalah salah satu faktor tidak tercapainya target penerimaan pajak serta disebabkan pula karena masih adanya beban pajak terutang Wajib Pajak yang tidak sesuai dengan yang dibebankan. Selain itu pula disebabkan pula oleh praktik perencanaan pajak (*Tax Planning*). Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan suatu praktik perpajakan yang digunakan untuk mengurangi atau meminimalisir beban

pajak yang ditetapkan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) terbagi menjadi dua yaitu penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) dan Penggelapan pajak (*Tax Evasion*). Penghindaran pajak yaitu suatu tindakan pengurangan beban pajak yang masih sesuai dengan undang-undang. Karena sulitnya Wajib Pajak dalam melakukan penghindaran pajak, maka yang bisa dilakukan oleh Wajib Pajak adalah dengan penerapan penggelapan pajak. Penggelapan pajak (*Tax Evasion*) adalah tindakan mengurangi beban pajak dengan melanggar undang-undang yang telah ditetapkan (Fatmawati, 2018).

Penghindaran pajak banyak dilakukan wajib pajak dikarenakan dibutuhkan pengetahuan dan pemahaman yang rinci untuk melakukan penghindaran pajak. Para pengguna jasa konsultan pajak biasanya yang melakukan penghindaran pajak. Penggelapan pajak merupakan pelanggaran undang-undang perpajakan dengan melaporkan jumlah pendapatan yang lebih rendah daripada pendapatan sebenarnya di satu pihak dan atau menyampaikan beban atau biaya yang lebih besar daripada sebenarnya di lain pihak. Tindakan penggelapan pajak terdapat beberapa kriteria yaitu Wajib Pajak memanipulasi harta yang dilaporkan, membayar pajak terutang yang tidak sesuai dengan yang ditetapkan dan tidak melaporkan SPT.

Beberapa contoh kasus tentang penggelapan pajak yang terjadi di Indonesia adalah kasus penggelapan yang dilakukan oleh mantan pegawai Direktorat Jendral Pajak Gayus Tambunan pada tahun 2009 yang merugikan negara sebesar lebih dari Rp74 miliar. Setelah itu kasus yang

melibatkan Direktur Utama PT Mutiara Virgo, Johny Basuki yang menyuap mantan pegawai pajak, Dhana Widyatmika pada tahun 2012 yang menyebabkan negara mengalami kerugian yang sangat banyak. Dan kasus penggelapan pajak terbaru terjadi di Surabaya yang melibatkan 2 pengusaha dengan total kerugian negara mencapai Rp5,54 Miliar. Dengan banyaknya kejadian pelanggaran perpajakan berupa penggelapan pajak membuat masyarakat merasa enggan untuk melaksanakan kewajibannya karena uang yang dikeluarkan tidak digunakan dengan semestinya.

Penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penggelapan pajak (*Tax Evasion*) sudah dilakukan, penelitian tersebut menghasilkan faktor-faktor apa saja yang membuat Wajib Pajak melakukan perbuatan penggelapan pajak. Faktor pertama Wajib Pajak melakukan tindakan penggelapan pajak adalah sifat *Machiavellian*. Seseorang yang mempunyai sifat machiavellian selalu menampilkan tindakan yang sinis, dingin, pemikiran yang rasional dan lebih kepada tidak berakhlak. Tindakan ini didasarkan pada pemikiran jangka panjang, motivasi untuk memuaskan diri sendiri seperti kekuasaan atau uang. Seseorang yang *machiavellian* berperan serta dalam tindakan eksploitasi dan penipuan (Farhan et al., 2019).

Farhan (2019) menuturkan terdapat bukti kepribadian *machiavellian* yang dimiliki individu mempengaruhi tindakan etis. Richmond melakukan penelitian antara machiavellian dan pertimbangan etis pada hasrat individu dalam menghadapi masalah etika. Hubungan atau ikatan yang terjadi adalah hubungan negatif, semakin tingginya sifat machiavellian individu

maka keputusan yang diambil juga semakin tidak etis. Berdasar penelitian yang dilakukan Farhan (2019) menghasilkan bahwa individu yang mempunyai sifat machiavellian akan menjurus untuk melakukan tindakan tidak etis misalnya penggelapan pajak.

Teknologi informasi perpajakan merupakan faktor kedua yang membuat Wajib Pajak untuk melakukan perilaku penggelapan pajak. Perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi saat ini sudah sangat dirasakan oleh seluruh aspek kehidupan. Perkembangan ini mempunyai peranan penting dalam perkembangan perpajakan di Indonesia yang ditandai dengan adanya *E-system*. Sekarang ini pemerintah terus menggalakkan dalam hal modernisasi layanan perpajakan dengan mensosialisasikan *E-system* perpajakan kepada masyarakat. *E-system* ini diharapkan mampu meningkatkan mutu pelayanan pajak bagi masyarakat. Sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dalam hal membayar pajak dapat meningkat. Ulfa (2015) memberi kesimpulan bahwa teknologi dan informasi perpajakan memberikan dampak terhadap penggelapan pajak. Tetapi pada penelitian yang dilakukan oleh (Fitriyanti, 2017), teknologi dan informasi perpajakan tidak berdampak bagi penggelapan pajak.

Faktor ketiga yang mendorong seseorang dalam melakukan penggelapan pajak adalah ketepatan pengalokasian dana pajak. Ketepatan pemerintah dalam mengalokasikan penerimaan pajak menjadi tolak ukur tepat tidaknya APBN yang dialokasikan untuk pembangunan fasilitas (Fatmawati, 2018). Oleh karena itu, jika penerimaan pajak yang telah

dibayarkan masyarakat semakin banyak seharusnya pemerintah dapat memberikan fasilitas yang lebih banyak untuk masyarakat. Jika pengalokasian dana tidak tepat, wajib pajak juga akan merasa enggan untuk membayar pajak sehingga akan membuat wajib pajak untuk melakukan tindakan penggelapan pajak (Fatmawati, 2018).

Faktor yang ke empat adalah kepercayaan kepada pemerintah. Lewis, Furnham & Webley (1995) dalam Angelina & Mangoting, (2014) melaporkan akan muncul keengganan dari WP untuk membayar pajak jika pemerintah mempergunakan pajak tersebut hanya untuk memperkaya diri sendiri. WP berpendapat lebih baik pajak yang ada digelapkan daripada di korupsi oleh pemerintah sendiri. Untuk masalah kepercayaan kepada pemerintah sendiri di Indonesia pada tahun 2016 mencapai 80 persen.

Status sosial ekonomi juga merupakan salah satu faktor terjadinya perilaku penggelapan pajak. Semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat untuk melakukan penggelapan pajak.

Berdasarkan ulasan latar belakang yang telah diterangkan diatas, peneliti termotivasi untuk mengetahui pengaruh *machiavellian*, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada pemerintah, status sosial ekonomi terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian dengan judul : “PENGARUH *MACHIAVELLIAN*, TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN DANA PAJAK, KEPERCAYAAN KEPADA PEMERINTAH DAN

STATUS SOSIAL EKONOMI TERHADAP PERSEPSI ETIKA PENGHELAPAN PAJAK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etika penghelapan pajak?
2. Apakah teknologi informasi berpengaruh terhadap persepsi etika penghelapan pajak?
3. Apakah ketepatan pengalokasian dana pajak berpengaruh terhadap persepsi etika penghelapan pajak?
4. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh terhadap persepsi etika penghelapan pajak?
5. Apakah status sosial ekonomi berpengaruh terhadap persepsi etika penghelapan pajak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh sifat *machiavellian* terhadap persepsi etika penghelapan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh teknologi informasi perpajakan terhadap persepsi etika penghelapan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh ketepatan pengalokasian dana pajak terhadap persepsi etika penghelapan pajak.
4. Untuk menganalisis pengaruh kepercayaan kepada pemerintah terhadap

persepsi etika penggelapan pajak.

5. Untuk menganalisis pengaruh status sosial ekonomi terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, yaitu :

1. Manfaat teoritis

- a. Bagi akademis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi materi berkaitan dengan penggelapan pajak bagi para akademisi dan memberikan tambahan wawasan mengenai pengaruh *machiavellian*, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan status sosial ekonomi terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

- b. Bagi peneliti

Peneliti ini dapat memberikan wawasan tambahan bagi peneliti mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi etika penggelapan pajak.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan saran bagi kantor pelayanan pajak dan bagi para wajib pajak dalam memahami *machiavellian*, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada pemerintah, dan status sosial ekonomi terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Theory Of Planned Behavior (TPB)

Theory of planned behavior adalah perluasan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang memiliki tujuan menunjukkan dari perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh seseorang atau individu dalam merespon sesuatu (Fatmawati, 2018). Terdapat tiga alasan dalam mempengaruhi perilaku atau tindakan seseorang menurut *Theory of Planned Behavior* :

- a. *Normative beliefs*, merupakan keyakinan yang timbul akan suatu harapan yang terpenuhi akibat dari motivasi dan pengaruh dari orang lain. hal tersebut kemudian akan membentuk variabel norma subjektif (*subjectif norm*).

Normative beliefs, berhubungan dengan persepsi etis penggelapan pajak, dimana status sosial ekonomi yang baik dapat memberikan dorongan kepada wajib pajak agar taat membayar pajak. Timbulnya persepsi yang menganggap ketepatan pengalokasian dana pajak dapat memberikan pengaruh terhadap sikap dan niat wajib pajak dalam membayar pajak. jika fasilitas umum yang diberikan pemerintah dirasa kurang dan dana yang dialokasikan tidak dipergunakan dengan baik, maka wajib pajak merasa bahwa tidak membayar pajak merupakan hal yang pantas. Karena pemerintah tidak bisa mengalokasikan dana pajak dengan baik dan tepat.

- b. *Control beliefs*, merupakan keyakinan yang timbul akibat adanya suatu hal yang mendorong atau menghambat perilaku yang ditunjukkan dan anggapan seberapa kuat hal tersebut dalam mendukung atau menghambat tindakan tersebut. Faktor eksternal berupa lingkungan dan diri pribadi merupakan sumber yang menghambat saat dilakukannya tindakan.

Dalam memenuhi kewajiban dan haknya, wajib pajak menggelontorkan dana untuk negara, tetapi masih saja terdapat fiskus dan pemerintah yang melakukan korupsi dana pajak. hal ini membuat kepercayaan wajib pajak kepada fiskus dan pemerintah berkurang yang mana dana yang dikeluarkan tidak bermanfaat bagi khalayak umum.

- c. *Behavior beliefs*, merupakan keyakinan atas hasil dari suatu tindakan dan penilaian atau evaluasi atas hasil dari tindakan tersebut kemudian akan membentuk suatu variabel sikap (*attitude*).

Dari uraian diatas kita dapat mengetahui sebelum seseorang melakukan suatu tindakan, seseorang tersebut sudah memikirkan konsekuensi yang akan diterima. *Theory of Planed Behavior* (TPB) relevan dalam menjelaskan penelitian ini, dikarenakan mempunyai salah satu faktor yaitu *attitude toward the behavior* yang mana mempunyai hubungan dengan *machiavellian* yang cenderung lebih memikirkan hasil dan resiko yang akan diperoleh. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penggelapan pajak dapat ditekan jika individu mampu berperilaku baik dalam menjalankan kegiatan

perpajakannya.

2. Technology Acceptance Model (TAM)

Untuk mengetahui diterima atau tidaknya suatu penggunaan teknologi computer maka dibuatkan suatu model untuk menganalisis dan memahami factor-faktor tersebut, yaitu *Technology Acceptance Model* (TAM). Salah satu hasil dari pengembangan TAM adalah *Theory of Reasoned* (TRA). (Fatmawati, 2018) mengatakan bahwa persepsi tentang manfaat dan persepsi tentang kemudahan dalam menggunakan teknologi informasi merupakan awal dari perilaku penggunaan teknologi informasi. (Fatmawati, 2018) menafsirkan persepsi tentang manfaat ini berlandaskan definisi dari kata *useful* yaitu boleh dipergunakan untuk maksud yang menguntungkan juga manfaat yang bisa diperoleh jika menggunakan teknologi informasi.

3. Teori Atribusi

Teori ini mendeskripsikan tentang komunikasi pada individu yang berusaha untuk memahami, menilai dan menyimpulkan sebab dari kejadian menurut persepsi individu (Fajarwati, 2016). Menurut Robbins (1996) dalam Farhan (2019), teori atribusi adalah apabila seorang individu mempelajari tindakan atau perilaku seseorang, lalu diambil keputusan apakah perilaku yang ditimbulkan tersebut secara internal ataukah eksternal. Perilaku internal merupakan perilaku yang timbul dari dalam diri seseorang, sedangkan perilaku eksternal adalah perilaku yang timbul dari luar individu tersebut.

Kepatuhan wajib pajak berhubungan dengan tindakan wajib pajak

dalam membuat penilaian terhadap pajak sendiri. Moral wajib pajak dipengaruhi oleh diri wajib pajak itu sendiri karena merasa dan menilai bahwa kewajibannya adalah ikut berkontribusi membayar pajak demi kesejahteraan umum. Seseorang dengan moral pajak yang tinggi lebih patuh untuk membayar pajak dan tidak melakukan penggelapan pajak.

4. Teori Persepsi

Menurut Farhan (2019) suatu proses penafsiran dan pengelolaan dari suatu informasi dari objek-objek serta kejadian-kejadian yang terdapat dalam lingkungan sekitar. Sesuatu yang berkaitan dengan kejadian atau objek di masa lalu merupakan pengalaman dan pembelajaran bagi manusia untuk bereaksi terhadap hal-hal tersebut.

Persepsi adalah makna yang diperoleh individu melalui menganalisa, menginterpretasi dan mengevaluasi melalui panca indera dengan memberikan suatu reaksi berupa kesan (Farhan et al., 2019). Menurut (Farhan et al., 2019), terdapat dua proses kerja yang saling menghubungkan dalam persepsi, yaitu :

- a. Menerima persepsi dengan penglihatan, sentuhan dan panca indera yang lain.
- b. Penafsiran makna atas persepsi inderawi tersebut.

Dengan begitu persepsi yaitu cara untuk memahami serta menafsirkan suatu keadaan atau objek tertentu, yang mana penafsiran tersebut diakibatkan oleh nilai yang terdapat pada individu tersebut. Banyak factor yang mempengaruhi persepsi yang terdapat dalam diri individu termasuk lingkungan social. Dalam lingkungan social inilah

seseorang akan terbentuk kepribadiannya, baik cara berpikir maupun cara pandang terhadap objek. Luasnya wawasan individu mengenai penggelapan pajak bergantung pada banyak atau tidaknya informasi yang diterima. Hal ini akan memotivasi seseorang untuk bertindak positif terhadap pelaksanaan perpajakan. Dalam hal ini persepsi penggelapan pajak boleh dikatakan timbul berdasarkan pengalaman wajib pajak itu sendiri, dan keinginan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak tersebut menjadikan persepsi tentang penggelapan pajak dianggap sebagai suatu hal yang wajar untuk dilakukan.

5. Etika Penggelapan Pajak

Etika dalam bahasa Yunani kuno “*ēthikos*” yang mempunyai arti “timbul dari kebiasaan” merupakan sesuatu bagaimana dan di mana cabang utama filsafat yang membahas kualitas atau nilai yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Menurut (Rchaironisyah, 2018) etika merupakan sebuah kebiasaan hidup baik yang timbul dari diri individu ataupun masyarakat dan menghindari dari tindakan yang buruk.

Salah satu makna dari etika adalah “prinsip tingkah laku yang mengatur kelompok atau individu.” Layaknya penggunaan kata etika personal yang cenderung mengarah pada aturan-aturan yang terdapat pada lingkungan yang mana individu menjalani hidupnya (velasques, 2005 dalam Renadya Wiyan Chaironisyah 2018). Dari penjelasan diatas, etika pajak merupakan suatu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya agar terhindar dari

penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah suatu usaha atau tindakan yang bertujuan untuk menghapus atau mengurangi hutang pajak yang telah sesuai dengan ketentuan yang ada dengan cara melanggar undang-undang perpajakan. Farhan (2019) mendefinisikan penggelapan pajak sebagai usaha untuk mengelak atau menghindari kewajiban yang dilakukan wajib pajak. Tindakan penggelapan pajak adalah suatu tindakan yang ilegal dikarenakan melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang ada. Tetapi memandang tindakan yang tidak seharusnya dilakukan banyak dilakukan oleh pemimpin, maka dalam pelaksanaannya menjadi biasa, seperti menyelewengkan dana pajak untuk urusan pribadi ataupun kelompok. Hal ini menjadikan para wajib pajak tidak takut untuk melakukan tindakan penggelapan pajak dikarenakan mereka beranggapan bahwa beban pajak yang mereka bayar tidak dikelola dengan baik (Fitriyanti, 2017).

Fhyel (2018) memaparkan bahwa tindakan penggelapan pajak dilakukan karena wajib pajak melakukan hal seperti ; (1) pembayaran yang tidak tepat waktu, (2) tidak tepat waktunya dalam mengisi surat pemberitahuan pajak, (3) wajib pajak tidak memenuhi kewajiban dalam hal pembukuan dan yang lainnya. Secara umum, tindakan penggelapan pajak merupakan hal yang melawan hukum dan perbuatan yang disengaja karena dalam pelaksanaannya tidak melaporkan kewajibanya secara jujur, lengkap dan benar (Fhyel, 2018).

Pengelolaan pendapatan dari pajak perlu dilakukan secara optimal

supaya tidak terjadi kebocoran dan bisa dimanfaatkan dengan baik demi kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan hal tersebut, transparansi pemerintah dalam manajemen keuangan negara, serta kontrol dari masyarakat dan penegak hukum perlu di tegaskan kembali (Fhyel, 2018). siahaan (2010) dalam Suminarsasi (2012) terdapat beberapa macam akibat dari penggelapan pajak, diantaranya : bidang keuangan, ekonomi, dan psikologi.

Terdapat tiga opini dalam etika penggelapan pajak. Opini ini dikembangkan oleh Crow (1994) dalam McGee & Jain (2012), berikut tiga opini dalam etika penggelapan pajak :

a. Opini Tidak Etis (*The Unethical Opinion*)

Opini ini mengemukakan bahwa penggelapan pajak selalu atau hampir selalu tidak etis. Hal ini disebabkan seorang individu mempunyai kewajiban kepada pemerintah untuk melakukan kewajiban yang sudah ditetapkan, seorang individu seharusnya berkontribusi untuk membayar jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

b. Opini Anarkis (*The Anarchist Opinion*)

Penggelapan pajak dipandang selalu etis. Dikarenakan individu berpendapat bahwa tidak pernah ada kewajiban untuk membayar pajak sebab negara tidak memiliki legitimasi dan dianggap tidak memiliki moral untuk mengambil apapun dari siapapun. Pada intinya, pajak dipandang sebagai pengambil hak orang lain.

c. Opini keadaan (*The Circumstance Opinion*)

Penggelapan pajak dipandang etis atau tidak bergantung pada kondisi. Etis atau tidaknya penilaian tentang tindakan penggelapan pajak didasarkan atas moral yang dapat dinilai dari sistem pajak, keadilan, tarif pajak, korupsi pemerintah atau tidak mendapat banyak imbalan atas pembayaran pajak, dan kemungkinan terdeteksi oleh fiskus.

6. Machiavellian

Seorang filsuf, diplomat dan politikus Italia bernama Niccolo Machiavelli memperkenalkan istilah *Machiavellian* yang berarti cara dimana seorang manipulator berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang lebih ketika memanipulasi (Farhan, 2019). Menurut Robbins dan Judge (2009:139) dalam Putu et al (2019) *machiavellianisme* adalah fase dimana seorang individu yang realistis atau pragmatis, mempertahankan jarak emosional dan yakin bahwa hasil lebih penting dari proses.

Pada dasarnya kepribadian *machiavelian* merupakan kepribadian yang kurang mempunyai afeksi dalam hubungan personal, tidak memperdulikan moralitas konvensional, dan menunjukkan komitmen ideologi yang rendah sehingga mempunyai kecenderungan yang manipulatif, perhitungan, dan dingin. Pelaku *Machiavellian* umumnya menggunakan perilaku persuasif demi mencapai tujuan yang diinginkan dan bersifat agresif (Farhan, 2019).

Seseorang dengan *machiavellianisme* yang tinggi lebih condong untuk kurang memperhatikan tentang moral seperti keadilan dan

kejujuran, bertindak egois untuk menang (Putu, 2019). hal senada juga dikatakan Devica (2015), bahwa seseorang dengan *machiavellian* yang tinggi cenderung untuk memanfaatkan kondisi untuk memperoleh keuntungan pribadi dan berkeinginan untuk melanggar aturan. Oleh sebab itu, individu dengan *machiavellian* yang tinggi lebih cenderung untuk melakukan *tax evasion* dibandingkan dengan individu dengan yang mempunyai sifat *machiavellian* yang rendah.

Machiavellian dapat diukur dengan menggunakan skala mach IV. Skala mach IV ini dipergunakan untuk mengukur keyakinan seorang responden apakah seseorang mudah untuk dimanipulasi dalam hubungan antarsesama. Seseorang dengan skala mach IV yang tinggi mempunyai sifat atau kepribadian manipulatif dan mempunyai sifat kognitif pada orang lain, dan sudut pandang individu *machiavellianisme* mempunyai tujuan (*goal oriented*) bukan *person oriented* maka mereka lebih cenderung berhasil dalam proses tawar menawar dari pada seseorang dengan skala mach IV yang rendah.

7. Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi informasi merupakan suatu cara mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi relevan, akurat dan tepat waktu. Saat ini pemerintah melalui Ditjen Pajak telah memodernisasi dalam pelayanan perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar hutang pajaknya. Menurut teori motivasi Hilgard dan Atkinson (1979) dalam Theo Kusuma Ardyaksa (2014) menyatakan

bahwa jika pelayanan perpajakan dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak semakin baik, maka akan meningkatkan motivasi para wajib pajak dalam membayar pajak.

Konsep modernisasi administrasi perpajakan pada intinya adalah merubah sistem administrasi perpajakan yang mana mengubah *mindset* atau pola pikir dan perilaku fiskus serta tata nilai organisasi yang dapat menjadikan Direktorat Jendral Pajak (DJP) menjadi lembaga yang mempunyai citra baik di masyarakat (Utami & Helmy, 2016). Majunya teknologi informasi perpajakan ditandai dengan adanya *e-system* dalam perpajakan, seperti *e-faktur*, *e-SPT*, *e-filling*, *e-registration*, *e-billing*, *on line payment* (Paramita & Budiasih, 2016).

Dari uraian diatas, diharapkan bagi Wajib Pajak untuk mempergunakannya dengan semaksimal mungkin dalam memenuhi kewajibannya dan terhindar dari tindakan penggelapan pajak. Akan tetapi, menurut Ayu (2009) dalam Ulfa (2015) menyatakan bahwa masih sangat rendahnya penggunaan teknologi terkait informasi perpajakan ataupun pembayaran pajak yang dilakukan orang pribadi. Masih banyak masyarakat yang menggunakan sistem manual dibandingkan dengan membuka website Ditjen Pajak.

8. Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak

Menurut Madjid & Syafi'ah Rahayu (2019) dalam Permatasari dan Inggrid (2013) Ketepatan pengelokasian dana pajak merupakan bentuk alokasi atau pengelolaan dana pajak yang dilakukan pemerintah guna mensejahterakan masyarakat. Pajak menjadi peranan yang penting bagi

sumber penerimaan terbesar bagi negara untuk menunjang bagi jalannya suatu pemerintahan dan pembangunan dan itu tidak bisa dipungkiri lagi (Madjid & Syafi'ah Rahayu, 2019). Pajak menggambarkan kualitas dan ketersediaan fasilitas bagi masyarakat. semakin baik dan terjangkau ketersediaan fasilitas, maka pengelolaan pajak tersebut terbilang baik.

Jika pemerintah tidak bisa mengelola pengeluarannya dengan baik maka akan timbul kecenderungan untuk melakukan tindakan penggelapan pajak yang tinggi (Ayu, 2009). Secara umum kemanfaatan pajak dapat dilihat dari semakin banyaknya fasilitas yang tersedia (Ardyaksa, 2014). Teori pembelajaran social Bandura (1989) dalam Robbins (2001) menjabarkan tentang tindakan wajib pajak ketika memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Kontribusi nyata terhadap pembangunan berpengaruh secara langsung terhadap ketaatan dan ketepatan waktu bagi wajib pajak untuk membayar pajak.

9. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan merupakan suatu keadaan mental berdasarkan kondisi dan konteks sosial seseorang. Seseorang akan mengambil sebuah keputusan apabila berdasarkan pada pilihan orang-orang yang ia percaya. Menurut kirchler (2008) dalam Saputra & Andi (2014) kepercayaan merupakan opini masyarakat yang dipegang oleh seorang individu dan kelompok sosial yang mana otoritas pajak bersifat baik dan bekerja untuk khalayak umum. Kepercayaan kepada pemerintah dan hukum yang tegas pada aturan-aturan yang ada, turut mendorong para wajib pajak untuk melakukan kewajibannya dalam membayar pajak.

Kirchler, Hoesl, dan Wahl (2008) dalam Ulfa (2015) mengartikan kepercayaan sebagai opini umum seseorang dan masyarakat bahwa otoritas pajak yang baik hati dan bekerja meguntungkan demi kebaikan bersama. Feld & Frey (2002) dalam Ulfa (2015) berpendapat bahwa ikatan antara pemerintah dan individu dijadikan sebagai komitmen psikologis yang melibatkan hubungan emosional yang kuat dan berkomitmen. Layaknya kontrak psikologis yang dapat dipertahankan dengan perlakuan positif yang berdasar pada kepercayaan. Percaya kepada pemerintah dapat meningkatkan impuls bagi seseorang untuk berkomitmen taat dan mematuhi undang-undang pajak.

Penggelapan pajak yang dilakukan masyarakat bergantung pada kepercayaan mereka terhadap pemerintah atas timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Penelitian yang dilakukan Ulfa (2015) menunjukkan hubungan kepercayaan dengan kepatuhan pajak dan penggelapan pajak. Penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Vogel (1974) dalam Saputra & Andi (2014) bahwa seseorang yang mempunyai kepercayaan (*trust*) yang besar terhadap pemerintah, cenderung tidak melakukan penggelapan pendapatan pajak.

Terdapat langkah-langkah kerja sama antara pemerintah dan masyarakat. Pertama, hukuman dan sanksi guna mendorong rasa kepatuhan, tetapi cara seperti ini tidak selalu berhasil. Kedua, membangun kepercayaan masyarakat pada pemerintah agar mentaati semua kebijakan dan prosedur yang dibuat pemerintah.

10. Status Sosial Ekonomi

Rahayu (2017) dalam Nauvalia & Herwinarni (2018) menjelaskan tentang status sosial ekonomi bisa dipahami dengan menegok asal katanya. Kata sosial berasal dari kata “*socius*” yang berarti teman. Teman dalam arti bukan hanya sebatas teman, melainkan mereka yang ada disekitar kita. Sedangkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” berarti mengatur, jadi secara umum ekonomi mempunyai arti cara mengelola rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia status merupakan keadaan atau kedudukan seseorang. Menurut Fajrin (2019) sosial ekonomi merupakan suatu keadaan atau kedudukan yang diatur dan sudah ditetapkan oleh seseorang untuk posisi tertentu dalam struktur masyarakat.

Tingkat penggelapan pajak dipengaruhi pula oleh tingkat status sosial ekonomi seseorang. Henslin (2007:92) dalam Nauvalia & Herwinarni (2018) berpendapat “Memahami seseorang dapat dilakukan dengan mempelajari tempat dimana ia tinggal. Yang paling memiliki pengaruh adalah kelas sosial berdasar penghasilan, pendidikan dan prestasi kerja”. Kelas sosial yang mempunyai pengaruh paling kuat dapat memberikan ide dan sikap. Status sosial ekonomi seseorang dengan kondisi yang baik lebih cenderung untuk bersikap lebih konsumtif, tidak etis, dan mementingkan dirinya sendiri. Orang yang mempunyai status sosial ekonomi yang tinggi umumnya tidak akan bertindak etis (Pemayun, 2018)

B. Penelitian Terdahulu

Berikut Tabel penelitian terdahulu yang dijadikan acuan penulis dalam penelitian ini dan digunakan peneliti dalam menentukan variabel penelitian.

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Judul penelitian & Peneliti	Variabel	Hasil
1.	Mampukah <i>Religiusity</i> Memoderasi Pengaruh <i>Machiavelluan</i> Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Dwi Suci Rahma Danti & Rachmawati Meita Oktaviani, 2020)	X1 : <i>Machiavellian</i> X2 : <i>Religiusity</i> Y : <i>Tax Evasion</i>	1. <i>Machiavellian</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax evasion</i> . 2. <i>Reliugisity</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax evasion</i> . 3. <i>Religiusity</i> tidak memoderasi pengaruh antara <i>machiavellian</i> dan <i>tax evasion</i>
2.	Pengaruh <i>Love Of Money</i> , <i>Machiavellian</i> , dan <i>Equity Sensitivity</i> Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (<i>Tax Evasion</i>) (Ni Putu Sri Murtining Asih & Kadek Trisna Dwiyanti, 2019)	X1 : <i>Love Of Money</i> X2 : <i>Machiavellian</i> X3 : <i>Equity Sensitivity</i> Y : Penggelapan Pajak	1. <i>Love Of Money</i> berpendaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak 2. <i>Machiavellian</i> berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak 3. <i>Equity Sensitivity</i> tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak

No	Judul penelitian & Peneliti	Variabel	Hasil
3.	Pengaruh <i>Love Of Money</i> dan <i>Machiavellian</i> Terhadap Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi (Toriq Ibnu Aziz, 2015)	X1 : <i>Love Of Money</i> X2 : <i>Machiavellian</i> Y : Persepsi Etis Mahasiswa Akuntansi	1. <i>Love Of Money</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap persepsi etis mahasiswa. 2. <i>Machiavellian</i> berpengaruh negatif terhadap persepsi etis mahasiswa
4.	Pengaruh Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah Terhadap Penggelapan Pajak (Auliya Ulfa, 2015)	X1 : Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan X2 : Teknologi dan Informasi Perpajakan X3 : Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah Y : Penggelapan Pajak	1. Kemungkinan Terdeteksinya, Teknologi dan Informasi Perpajakan, dan Kepercayaan pada Otoritas Pemerintah secara bersama-sama berpengaruh dan signifikan terhadap penggelapan pajak.
5.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Renadya Wiyan Chaironisyah, 2018)	X1 : keadilan Perpajakan X2 : Diskriminasi Perpajakan X3 : sistem Perpajakan X4 : Teknologi dan Informasi Perpajakan Y : Persepsi Wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak	1. Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 2. Diskriminasi perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak. 3. Sistem perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak

No	Judul penelitian & Peneliti	Variabel	Hasil
			mengenai etika penggelapan pajak. 4. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak.
6.	Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan pajak (Charles Silaen, 2015)	X1 : Sistem Perpajakan X2 : Diskriminasi X3 : Teknologi dan Informasi Perpajakan Y : Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan pajak	1. Sistem perpajakan berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak 2. Diskriminasi berpengaruh secara parsial terhadap etika penggelapan pajak. 3. Teknologi dan informasi perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap etika penggelapan pajak
7.	Minimalisasi Tax Evasion Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah. (Inggrid Permatasari & Herry Laksito, 2013)	X1 : Tarif Pajak X2 : Teknologi dan Informasi Perpajakan X3 : Keadilan Sistem Perpajakan X4 : Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah Y : Tax Evasion	1. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tax evasion 2. Teknologi dan informasi perpajakan berpengaruh negatif. 3. Keadilan sistem perpajakan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion. 4. Ketepatan pengalokasian

No	Judul penelitian & Peneliti	Variabel	Hasil
			pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif signifikan terhadap tax evasion.
8.	Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi dan Informasi Perpajakan Terhadap <i>Tax Evasion</i> (Theo Kusuma Ardyaksa & Kiswanto, 2014)	X1 : Keadilan X2 : Tarif Pajak X3 : Ketepatan Pengalokasian X4 : Teknologi dan Informasi Perpajakan Y : <i>Tax Evasion</i>	1. Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran dan Teknologi Informasi Perpajakan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Penggelapan pajak. 2. Keadilan sistem perpajakan, tarif pajak dan kemungkinan terdeteksinya kecurangan secara parsial tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.
9.	Pengaruh Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Moral Pajak dan <i>Money Ethics</i> Terhadap Penggelapan Pajak (Lulu Fatmawati, 2018)	X1 : Keadilan X2 : Ketepatan Pengalokasian X3 : Moral Pajak X4 : <i>Money Ethics</i> Y : Penggelapan Pajak	1. Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, dan <i>Money Ethics</i> tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. 2. Moral Pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.
10.	Pengaruh Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan	X1 : Pandangan Sosial X2 : Usia	Pandangan Sosial, Usia, dan Kepercayaan Kepada Pemerintah secara

No	Judul penelitian & Peneliti	Variabel	Hasil
	<p>Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya</p> <p>(Maria Angelina Sutiono & Yenni Mangoting, 2014)</p>	<p>X3 : Kepercayaan Kepada Pemerintah</p> <p>Y : Tax Evasion</p>	<p>simultan dan parsial mempengaruhi praktik penggelapan pajak di Surabaya.</p>
11.	<p>Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak</p> <p>(Friska Ade Nauvalia, Yuniarti Hermawan dan Tri Sulistyani, 2018)</p>	<p>X1 : Religiusitas</p> <p>X2 : Pemahaman Perpajakan</p> <p>X3 : Status Sosial ekonomi</p> <p>X4 : <i>Love Of Money</i></p> <p>Y : Persepsi Penggelapan Pajak</p>	<p>1. Religiusitas secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.</p> <p>2. Pemahaman perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap penggelapan pajak.</p> <p>3. Status sosial ekonomi secara parsial tidak berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.</p> <p>4. Love Of Money secara parsial berpengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak.</p>
12.	<p>Pengaruh Diskriminasi Pajak, Status Sosial Ekonomi, Pemahaman Pajak, dan Sistem Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi di Kab.</p>	<p>X1 : Diskriminasi Pajak</p> <p>X2 : Status Sosial Ekonomi</p> <p>X3 : Pemahaman Pajak</p> <p>X4 : Sistem Perpajakan</p> <p>Y : Penggelapan Pajak</p>	<p>1. diskriminasi pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak</p> <p>2. Status sosial ekonomi berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak</p> <p>3. Pemahaman pajak berpengaruh positif</p>

No	Judul penelitian & Peneliti	Variabel	Hasil
	Klaten		terhadap penggelapan pajak' 4. sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap penggelapan pajak.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah model yang menjelaskan hubungan antara teori yang ada dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Faktor-faktor tersebut adalah *machiavellian*, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian, kepercayaan kepada pemerintah, dan status sosial ekonomi.

1. Pengaruh *Machiavellian* Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak.

Menurut Richmond (2001) dalam Farhan (2019) *Machiavellian* merupakan suatu cara seseorang untuk mendapatkan suatu kompensasi lebih dengan cara memanipulasi. Istilah *Machiavellian* ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang filsuf, diplomat dan politikus Italia, Niccolo Machiavelli. Sifat ini biasanya disangkut pautkan dengan individu yang manipulatif, dengan cara persuasif demi mencapai tujuan pribadinya dan cenderung agresif. Menurut Robbins dan Judge (2009:139) dalam Ramadhani (2015) *machiavellianisme* adalah ukuran dimana individu yang realistis, mempertahankan jarak emosional, dan meyakini bahwa suatu hasil lebih penting dibandingkan dengan proses.

Hasil penelitian dari danti (2015) membuktikan bahwa sifat *machiavellian* yang dimiliki seseorang mempengaruhi penggelapan pajak. Seseorang yang memiliki sifat *machiavellian* cenderung untuk

memanfaatkan situasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan tidak taat pada aturan yang berlaku. Putu (2019) juga membuktikan keterpengaruhan perilaku *Machiavellian* terhadap persepsi etis yaitu semakin tingginya tingkat *Machiavellian* seseorang, maka semakin tinggi pula kemungkinan seseorang untuk melakukan tindakan tax evasion. Penelitian yang dilakukan oleh Aziz (2015) juga menunjukkan bahwa *machiavellian* berpengaruh terhadap persepsi etis mahasiswa. Menurut beberapa hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa semakin tingginya sifat *machiavellian* seseorang maka semakin tinggi tingkat persepsi yang menyatakan bahwa tindakan penggelapan pajak itu tidak etis.

2. Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Teknologi informasi merupakan merupakan suatu cara mengolah data untuk menghasilkan suatu informasi relevan, akurat dan tepat waktu. Upaya modernisasi yang dilakukan pemerintah sekarang ini menjadi harapan untuk meningkatnya kualitas pelayanan, sehingga kepatuhan wajib pajak dapat meningkat. Menurut Silaen (2015) merupakan pengaplikasian sarana dan prasarana perpajakan dengan menggunakan ilmu dan kemajuan teknologi dan informasi perpajakan demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap Wajib Pajak. Dengan maju dan memadainya teknologi informasi perpajakan dapat mengefektifkan waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Keterpengaruh teknologi informasi terhadap penggelapan pajak menurut Permatasari, Inggrid (2013) dengan semakin tingginya teknologi dan informasi perpajakan maka tingkat penggelapan pajak semakin rendah. Hal senada juga diungkapkan (Ardyaksa, 2014) dengan semakin baiknya teknologi informasi perpajakan, maka perilaku tindakan penggelapan pajak dianggap tidak baik atau etis, sebaliknya dengan makin buruknya teknologi dan informasi perpajakan yang ada maka perilaku tindakan penggelapan pajak cenderung dianggap baik atau etis.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh (Ardyaksa, 2014) bahwa teknologi dan informasi perpajakan memiliki pengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Hal senada juga diungkapkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Silaen (2015) dan Permatasari, Inggrid (2013) Maka dari kesimpulan diatas bahwa dengan tinggi nya teknologi dan informasi perpajakan maka tingkat penggelapan pajaknya semakin rendah.

3. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Fungsi penerimaan pajak menjadi berpengaruh dalam jalannya pembangunan dan pemerintahan. Masyarakat berkeinginan kepada pemerintah untuk dapat mengalokasikan pajak yang diterima digunakan sesuai dan tepat sasaran untuk kesejahteraan rakyat (Fitriyanti et al., 2017)

Menurut Madjid & Syafi'ah Rahayu (2019) tingginya

kecenderungan melakukan penggelapan pajak dilakukan jika pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah tidak baik. Penelitian yang dilakukan Theo Kusuma Ardyaksa (2014) semakin tidak tepatnya alokasi dana yang dilakukan pemerintah terhadap dana pajak yang dipergunakan, maka kecenderungan wajib pajak dalam melakukan tindakan penggelapan pajak semakin tinggi. Sehingga ketepatan pengalokasian berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Inggrid (2013), mengindikasikan rendahnya ketepatan pengalokasian pemerintah yang berasal dari pajak. jika tidak ditinjau lanjuti dengan tegas maka diprediksi dalam jangka waktu yang panjang akan dapat memunculkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan pengalokasian pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan bersifat signifikan. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Ayu (2009) bahwa ketepatan pemanfaatan hasil pajak berpengaruh negatif terhadap penggelapan pajak.

4. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Kepercayaan merupakan suatu keadaan mental berdasarkan kondisi dan konteks sosial seseorang. Seseorang akan mengambil sebuah keputusan apabila berdasarkan pada pilihan orang-orang yang ia percaya. Kepercayaan Feld & Frey (2002) dalam Ulfa (2015) mengemukakan pendapat tentang hubungan individu dengan pemerintah yang dianggap sebagai komitmen psikologis yang

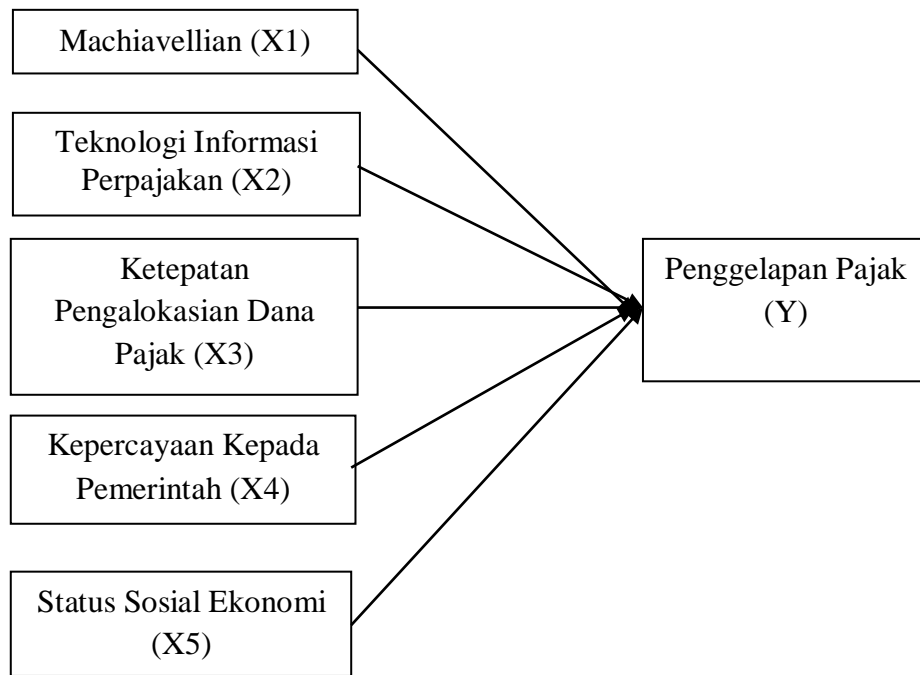
melibatkan hubungan emosional yang kuat dan loyalitas. Ivanyina, Moumouras & Rangazas (2010) dalam Ulfa (2015) menemukan kasus bahwa pemerintah korup yang terdapat di negara-negara berkembang akan menurunkan pendapatan pajak, dengan kata lain penggelapan pajak meningkat. Demir (2011) dalam Ulfa (2015) melaporkan bahwa pelayanan publik yang baik akan menurunkan perilaku penggelapan pajak di Turki. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Kastlunger dan Kogler (2013) dalam Ulfa (2015) menunjukkan tentang kepercayaan berpengaruh dengan kepatuhan pajak dan penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian Angelina & Mangoting (2014) masyarakat percaya terhadap pemerintah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap praktik penggelapan pajak. penelitian yang dilakukan Rahim, n.d. (2016) menunjukkan hasil yang sama yaitu negatif terhadap penggelapan pajak. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tingginya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah, maka tingkat penggelapan pajak akan berkurang.

5. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak

Status sosial ekonomi merupakan gambaran kondisi seseorang yang dilihat dari segi sosial dan ekonomi, seperti tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan sebagainya (Pemayun, 2018). Menurut Nauvalia & Herwinarni (2018) dengan mempelajari tempat sosial yang mereka tempati di kehidupan maka kita akan dapat memahami seseorang.

penghasilan, pendidikan, dan prestasi kerja merupakan hal yang paling dominan dalam memahami status sosial seseorang. Semakin tingginya tingkat sosial ekonomi seseorang akan berpengaruh dengan semakin tingginya pula tingkat persepsi etika bahwa penggelapan pajaknya merupakan tindakan yang tidak etis.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Nauvalia & Herwinarni (2018) bahwa status sosial ekonomi secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap persepsi penggelapan pajak pada mahasiswa akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis universitas pancasakti tegal. Hal senada juga di ungkapkan dalam penelitian yang dilakukan Angelina & Mangoting (2014) bahwa pandangan sosial secara simultan dan parsial mempengaruhi penggelapan pajak. Menurut hasil penelitian yang dilakukan (Munafiäh, 2020) status sosial ekonomi mempunyai pengaruh yang positif terhadap penggelapan pajak.



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

D. Hipotesis

Berdasarkan ulasan kerangka pemikiran diatas, maka dapat diambil hipotesis sebagai berikut :

- H1 : Sifat Machiavellian berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak
- H2 : Teknologi Informasi Perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak
- H3 : Ketepatan Pengaloksian Dana Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak
- H4 : Kepercayaan Kepada Pemerintah berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

H5 : Status Sosial Ekonomi berpengaruh positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang mana jenis data digunakan adalah jenis data primer. Menurut Fatmawati (2018) pendekatan kuantitatif merupakan metode pendekatan yang berdasar pada gejala atau fenomena untuk melakukan penelitian terhadap suatu populasi dengan digunakannya instrumen-instrumen yang ada dengan analisis data yang bersifat statistik.

Data primer adalah jenis data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama. Metode ini digunakan untuk meneliti pengaruh machiavellian, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian, kepercayaan kepada pemerintah, dan status sosial ekonomi terhadap persepsi penggelapan pajak.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut Sari (2015), Populasi merupakan suatu wilayah secara umum yang terdiri dari subyek ataupun obyek yang memiliki karakteristik tertentu dan kualitas yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal sebanyak 171.767 orang.

2. Sampel

Sampel merupakan bagian yang berkarakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi (Sugiyono, 2018:118). Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan wajib pajak orang pribadi yang mempunyai pekerjaan bebas profesional yang terdaftar di KPP Pratama Kota Tegal. Berikut cara untuk menghitung sampel yang menggunakan rumus slovin :

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

keterangan :

n = Jumlah anggota sampel

N = Jumlah populasi

Ne² = Nilai kritis (batas ketelitian 0,1)

Perhitungan sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{171.767}{(1 + 171.767(0,1)^2)}$$

$$n = 99,94$$

dari jumlah perhitungan sampel di atas, maka jumlah minimal kelaikan sampel adalah 99,94. Demi memudahkan dalam perhitungan jumlah minimal kelaikan sampel akan di putuskan sejumlah 100 responden.

3. Teknik Pengambilan Sampel

Peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode Aksidental sampling yaitu pengambilan sampel berdasar pada secara

kebetulan bertemu peneliti yang mana dapat dijadikan sampel dan cocok untuk dijadikan sebagai sumber data (Fatmawati, 2018)

C. Definisi Konseptual dan Operasional

1. Definisi Konseptual

a. Penggelapan Pajak (Y)

Menurut Theo Kusuma Ardyaksa (2014) penggelapan pajak merupakan usaha untuk meringankan beban pajak yang dilakukan wajib pajak dengan cara melanggar undang-undang.

b. *Machiavellian*

Seorang filsuf dan diplomat asal italia memperkenalkan istilah *machiavellian*. *machiavellian* mempunyai arti proses dimana seorang manipulator mendapatkan reward atau imbalan lebih ketika mereka memaniulasi, sementara orang lain tidak mendapatkan yang seperti dia lakukan (Farhan et al., 2019)

c. Teknologi Informasi Perpajakan

Teknologi informasi adalah teknologi untuk mengolah data dengan berbagai cara demi menghasilkan informasi yang berkualitas yang berguna untuk pengambilan keputusan.

d. Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak

Menurut Theo Kusuma Ardyaksa (2014) ketepatan pengalokasian adalah standar yang digunakan untuk mengetahui seberapa tepat tujuannya alokasi APBN itu digunakan dengan semestinya. Semua pengeluaran yang dialokasikan negara tercermin dalam APBN dan APBN yang berada di pos belanja.

e. Kepercayaan Kepada Pemerintah

Kepercayaan merupakan suatu pengharapan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang didasarkan untuk saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Saputra & Andi (2014) mengartikan kepercayaan sebagai pendapat secara umum individu dan kelompok sosial bahwa otoritas pajak yang baik hati dan bekerja menguntungkan untuk kebaikan bersama.

f. Status Sosial Ekonomi

Kata sosial berasal dari kata “*socius*” yang berarti teman (kawan). Dalam hal ini yang dimaksudkan teman adalah mereka yang dekat dan tinggal disekitar kita serta mempunyai sifat yang saling mempengaruhi. Sedangkan kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani “*oikos*” artinya rumah tangga dan “*nomos*” artinya mengatur. Jadi secara harfiah ekonomi mempunyai arti cara mengatur rumah tangga.

2. Operasional Variabel

Tabel 3.1

Operasional Variabel

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
1.	<i>Persepsi Etis Penggelapan pajak (Y)</i> (McGee & Jain, 2012) dan (Friskianti, 2014)	Opini etika penggelapan pajak	- Opini menyatakan bahwa penggelapan pajak selalu atau hampir selalu tidak etis. - Opini berpendapat bahwa tidak ada kewajiban untuk membayar pajak sebab negara tidak mempunyai legitimasi dan dianggap tidak	<i>Interval</i>

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
			bermoral sehingga tidak memiliki otoritas untuk mengambil apapun dari siapapun. - Opini beranggapan bahwa selalu ada alasan apapun untuk melakukan penggelapan pajak.	
		Penyebab penggelapan pajak	- Wajib Pajak tidak menyampaikan SPT - Wajib Pajak menyampaikan SPT dengan tidak benar - Wajib Pajak tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut - Wajib Pajak berusaha menyuap fiskus.	
2.	<i>Machiavellian (X1)</i> (Noviyana, 2019)	Persepsi terhadap tindakan orang lain	- Penilaian baik terhadap tindakan orang lain - Penilaian buruk terhadap tindakan orang lain	<i>Interval</i>
		Moral	- Kejujuran dalam berperilaku - Motivasi untuk meningkatkan kinerja.	
3.	<i>Teknologi Informasi Perpajakan (X2)</i> (Ayu, 2009)	Fasilitas Teknologi Informasi Perpajakan	- Ketersediaan teknologi yang berkaitan dengan perpajakan. - Memadainya teknologi yang berkaitan dengan pajak. - Kemudahan akses informasi perpajakan - Pemanfaatan fasilitas teknologi informasi perpajakan	<i>Interval</i>

No	Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		Optimalisasi pencegahan penggelapan pajak	<ul style="list-style-type: none"> - mampu mendukung program transparansi dan keterbukaan - mencegah penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang oleh aparat pajak - memungkinkan tidak terjadinya KKN 	
4.	<i>Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak (X3)</i> (Ayu, 2009)	Prinsip manfaat dari penggunaan uang yang bersumber dari pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Transparansi pengolahan dana pajak - Keproporsionalan pemanfaatan dana pajak 	Interval
		Pendistribusian dana yang bersumber dari pajak	<ul style="list-style-type: none"> - Ketepatan pendistribusian - Hasil dari pendistribusian dana pajak 	
5.	<i>Kepercayaan Kepada Pemerintah (X4)</i> (Mufti et al., 2020)	<i>Willingness to endorse</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Trustworthy</i> - <i>Responsiveness</i> - <i>Integrity</i> 	Interval
		<i>Share norms and values</i>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>Compassion and understanding</i> - <i>Worthy of pride</i> 	
6.	<i>Status Sosial Ekonomi (X5)</i> ((Khoiroh, 2017& Aryani et al., 2018)	Pendapatan ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendapatan - Tingkat pengeluaran 	Interval
		Status sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Status ekonomi - Tingkat pendidikan 	

D. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuisioner. Menurut Fhyel (2018) kuesioner merupakan sebuah teknik pengumpulan data dengan menggunakan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. atau pernyataan

tertulis kepada responden untuk dijawab. Penggunaan data dalam penelitian ini didapat dengan survey secara langsung menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden secara langsung.

Pengukuran jawaban responden dalam penelitian ini menggunakan skala likert, yang mana untuk mengetahui pengaruh dari variabel-variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut perincian skala Likert yang digunakan untuk mengukur pendapat responden :

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

2 = Tidak Setuju (TS)

3 = Netral (N)

4 = Setuju (S)

5 = Sangat Setuju (SS)

E. Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

Valid dan reliabelnya item kuisisioner menentukan baik buruknya skala penelitian. Item kuisisioner yang baik merupakan item yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid (Fhyel, 2018). Valid diartikan bisa digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan item yang reliabilitas adalah item yang jika digunakan berkali-kali dalam waktu yang berlainan maka akan menghasilkan data yang sama.

1. Uji Validitas

Uji validitas merupakan standar yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan menurut Fhyel (2018) uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah tidaknya atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Pengukuran kevalidan kuesioner dengan menghubungkan korelasi antar skor tiap item pertanyaan dengan total skor variabel (jumlah seluruh skor item pertanyaan) atau dinamakan korelasi *bivariate pearson*. Uji signifikansi diperlakukan dengan cara membandingkan r_{hitung} dengan r_{tabel} untuk *degree of freedom* (df) = $n-2$, n adalah jumlah sampel. Pernyataan yang tidak valid jika r_{hitung} (tiap item dapat dilihat pada kolom *corrected item –total correlation*) lebih besar dari r_{tabel} dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Fhyel, 2018).

2. Uji Reliabilitas

Fhyel (2018) berpendapat reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Kuisisioner dinyatakan reliabel jika jawaban yang diberikan dari kuesioner tersebut menghasilkan jawaban yang konsisten. Pengukuran diukur dengan melakukan jawaban yang konsisten.

Pengukuran diukur dengan melakukan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Yang mana pengukuran dilakukan sekali dan hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan yang lain. Pengukuran ini berupa uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan mempunyai reliabilitas yang baik (Fhyel, 2018)

F. Metode Analisis Data

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Metode ini dipergunakan untuk mengukur

seberapa pengaruhkah variabel independen terhadap variabel dependennya. Berikut langkah-langkah dalam menganalisis data, yaitu :

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah suatu teknik analisis dengan memberikan suatu gambaran atau deskriptif pada suatu data yang dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis dan *skweness* (kemencengan distribusi) (Fhyel, 2018).

a. Uji Validitas

Uji validitas merupakan standar yang menunjukkan sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan menurut Fhyel (2018) uji validitas dipergunakan untuk mengukur sah tidaknya atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Pengukuran kevalidan kuesioner dengan menghubungkan korelasi antar skor tiap item pertanyaan dengan total skor variabel (jumlah seluruh skor item pertanyaan) atau dinamakan korelasi *bivariate pearson*. Uji signifikansi diperlakukan dengan cara membandingkan rhitung dengan rtabel untuk *degree of freedom* ($df = n-2$), n adalah jumlah sampel. Pernyataan yang tidak valid jika rhitung (tiap item dapat dilihat pada kolom *corrected item –total correlation*) lebih besar dari rtabel dan nilai r positif maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Fhyel, 2018).

b. Uji Reliabilitas

Fhyel (2018) berpendapat reliabilitas merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kuesioner yang merupakan indikator

dari variabel. Kuisioner dinyatakan reliabel jika jawaban yang diberikan dari kuesioner tersebut menghasilkan jawaban yang konsisten. Pengukuran diukur dengan melakukan jawaban yang konsisten.

Pengukuran diukur dengan melakukan *one shot* atau pengukuran sekali saja. Yang mana pengukuran dilakukan sekali dan hasilnya akan dibandingkan dengan pertanyaan yang lain. Pengukuran ini berupa uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Jika suatu variabel mempunyai nilai *Cronbach's Alpha* $> 0,6$ maka variabel tersebut dinyatakan mempunyai reliabilitas yang baik (Fhyel, 2018)

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji ini digunakan untuk menguji apakah model regresi, variabel dependen dan independen yang dilakukan dalam penelitian memiliki distribusi yang normal atau tidak (Fhyel, 2018). Uji normal ini berasumsikan jika nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji statistik terdegradasi jika variabel yang tidak terdistribusi secara normal menceng ke kiri atau menceng ke kanan. Metode yang digunakan dalam uji normalitas ini adalah metode *Kolmogorov Smirnov* (K-S). H_0 diterima (terdistribusi normal) jika probability value $> 0,05$. Sedangkan H_0 ditolak (tidak terdistribusi normal) jika probability value $< 0,05$ (Fhyel, 2018).

b. Uji Multikolinieritas

(Munafiäh, 2020) berpendapat bahwa uji multikolinieritas dilakukan untuk menguji apakah ada hubungan antar variabel bebas

pada model regresi. Baik tidaknya suatu model regresi ditentukan dengan ada tidaknya hubungan diantara variabel independen. Jika terdapat korelasi antar variabel independen, maka variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasinya diantara variabel independen sama dengan nol.

Cara yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidak multikolinieritas adalah dengan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance* . Kedua cara pengukuran ini akan menunjukkan variabel independen mana yang dapat dijelaskan oleh variabel lainnya. Jadi, nilai toleransi yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$). Kriteria pengambilan keputusan dengan nilai tolerance dan VIF sebagai berikut :

- Nilai $Tolerance \geq 0,10$ atau nilai $VIF \leq 10$ (tidak terjadi multikolinieritas).
- Nilai $Tolerance \leq 0,10$ atau nilai $VIF \geq 10$ (terjadi multikolinieritas).

c. Uji Glejser (Heteroskeditas)

Uji Glejser atau Uji Heteroskedasitas digunakan untuk mengetahui apakah ada kesamaan varian antar pengamatan (Fatmawati, 2018). Kriteria yang dipergunakan yaitu apabila terdapat nilai $sig > 0,05$ atau 5% maka tidak ada indikasi heteroskedasitas.

3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

$$Y = a + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + \beta_4X_4 + \beta_5X_5 + e$$

Dimana :

Y = Penggelapan pajak

a = Konstanta

β_1 = koefisien regresi variabel machiavellian

β_2 = koefisien regresi variabel teknologi informasi
perpajakan

β_3 = koefisien regresi variabel ketepatan pengalokasian

β_4 = koefisien regresi variabel kepercayaan kepada
pemerintah

β_5 = koefisien regresi variabel status sosial ekonomi

X1 = Machiavellian

X2 = Teknologi Informasi Perpajakan

X3 = Ketepatan Pengalokasian

X4 = Kepercayaan Kepada Pemerintah

X5 = Status Sosial Ekonomi

e = error yang ditorelir (5%)

4. Uji Hipotesis

Menurut (Munafiä, 2020), hipotesis adalah pengujian yang menunjukkan sejauh mana pengaruh satu variabel independen secara

individual dalam menjelaskan varian variabel dependennya. Pengukuran uji hipotesis dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan t_{tabel} . Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan tingkat signifikansi $< 0,05$ maka hipotesis alternatif diterima yang menyatakan bahwa variabel penjelas/independen secara individual mempengaruhi variabel dependen

a. Uji F

Uji F dipergunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang bekerja secara simultan. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} , yang mana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima dengan signifikansi $< 0,05$.

b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji signifikansi t dipergunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dari masing-masing variabel independen dengan variabel dependennya pada model regresi (Fhyel, 2018). Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Diterima atau ditolaknya hipotesis dilakukan dengan kriteria berikut :

- H_0 ditolak jika $p\text{-value (significant } -t) < 0,05$ dan koefisien regresi sesuai dengan yang di prediksi.
- H_0 gagal ditolak jika $p\text{-value (significant } -t) > 0,05$ dan koefisien regresi tidak sesuai dengan yang diprediksi.

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dilakukan untuk menunjukkan sejauh mana kemampuan model dalam menjelaskan varian variabel dependen dengan nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Suatu model dapat menjelaskan variasi dependen terbatas, jika nilai R^2 kecil. Sedangkan jika nilai R^2 besar mendekati 1 maka dapat menjelaskan variabel independen dengan informasi yang relevan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Kantor KPP Pratama Tegal

Pada Juni tahun 1964 didirikan sebuah Kantor Inspeksi Keuangan Pekalongan yang diresmikan oleh Direktur Jendral Pajak Drs. Soejono Brotodihardjo, yang mana wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes.

Tidak hanya dari dulu tetapi hingga sekarang, Tegal bukan saja dikenal dengan penghasil gula tebunya, tetapi juga dengan penghasil ikan. Selain itu dikembangkan juga pertanian bawang putih yang berada di sekitar gunung Slamet, sedangkan untuk bawang merah dan cabai merah terletak di Kabupaten Brebes yang mempunyai area yang luas dan mampu memenuhi stok nasional untuk komoditi tersebut.

Dengan meningkatnya potensi ekonomi di masyarakat Tegal dan sekitarnya, Dirjen Pajak mempertimbangkan supaya Kantor Dinas Luar (KDL) menjadi Kantor Inspeksi Tegal. Pada tahun 1970 Menteri Keuangan menyetujui kenaikan status untuk Kantor Inspeksi Tegal dengan pimpinan sementara Bapak Soeryodiningrat sebagai pimpinan kantor.

Sesuai Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 276/KMK/01/1989 tanggal 25 Maret 1989, nama Kantor Inspeksi Tegal berubah nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak, dengan di dasari bahwa tugas Dirjen

Pajak tidak hanya melakukan inspeksi tetapi juga mengutamakan pelayanan administrasi pajak kepada masyarakat terutama bagi Wajib Pajak. Tahun 2008 berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 67/PMK.01/2008 KPP Tegal berubah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal.

2. Kedudukan dan Wilayah Kerja KPP Pratama Tegal

KPP Pratama Tegal termasuk dalam koordinasi Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, terletak di jalur pantura yang menghubungkan Jakarta - Surabaya. KPP Pratama Tegal mempunyai luas wilayah kerjasebesar 458.339 Km yang terdiri dari tiga daerah meliputi :

- a Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal
- b Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal
- c Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes

Dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a Sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa.
- b Sebelah selatan dibatasi oleh Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes.
- c Sebelah timur dibatasi oleh Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal.
- d Sebelah barat dibatasi oleh Kecamatan Losari, Kabupaten Tegal.

3. Visi dan Misi pada Kantor KPP Pratama Tegal

Di setiap cabang KPP di daerah mempunyai visi. Visi dari Kanwil DJP Jawa Tengah I “Menjadikan Kanwil DJP Jawa Tengah I sebagai institusi pemerintahan yang dapat dibanggakan masyarakat Jawa Tengah dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi”.

Dalam misinya Kanwil DJP Jawa Tengah I “Mendukung penerimaan pajak Negara berdasarkan Undang-Undang Perpajakan mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan APBN melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien”.

Visi KPP Pratama Tegal

“Menjadikan KPP yang handal. Inovatif dan akuntabel dalam melayani wajib pajak”.

Misi KPP Pratama Tegal

“Melayani wajib pajak secara optimal untuk mewujudkan wajib pajak yang taat dan patuh pajak.”

Untuk menjalankan misi dalam setiap pegawai KPP Pratama Tegal yang harus selalu memegang nilai-nilai dari Kementrian Keuangan sebagai berikut:

- a) Integritas → Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
- b) Profesionalisme → Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
- c) Sinergi → membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan.

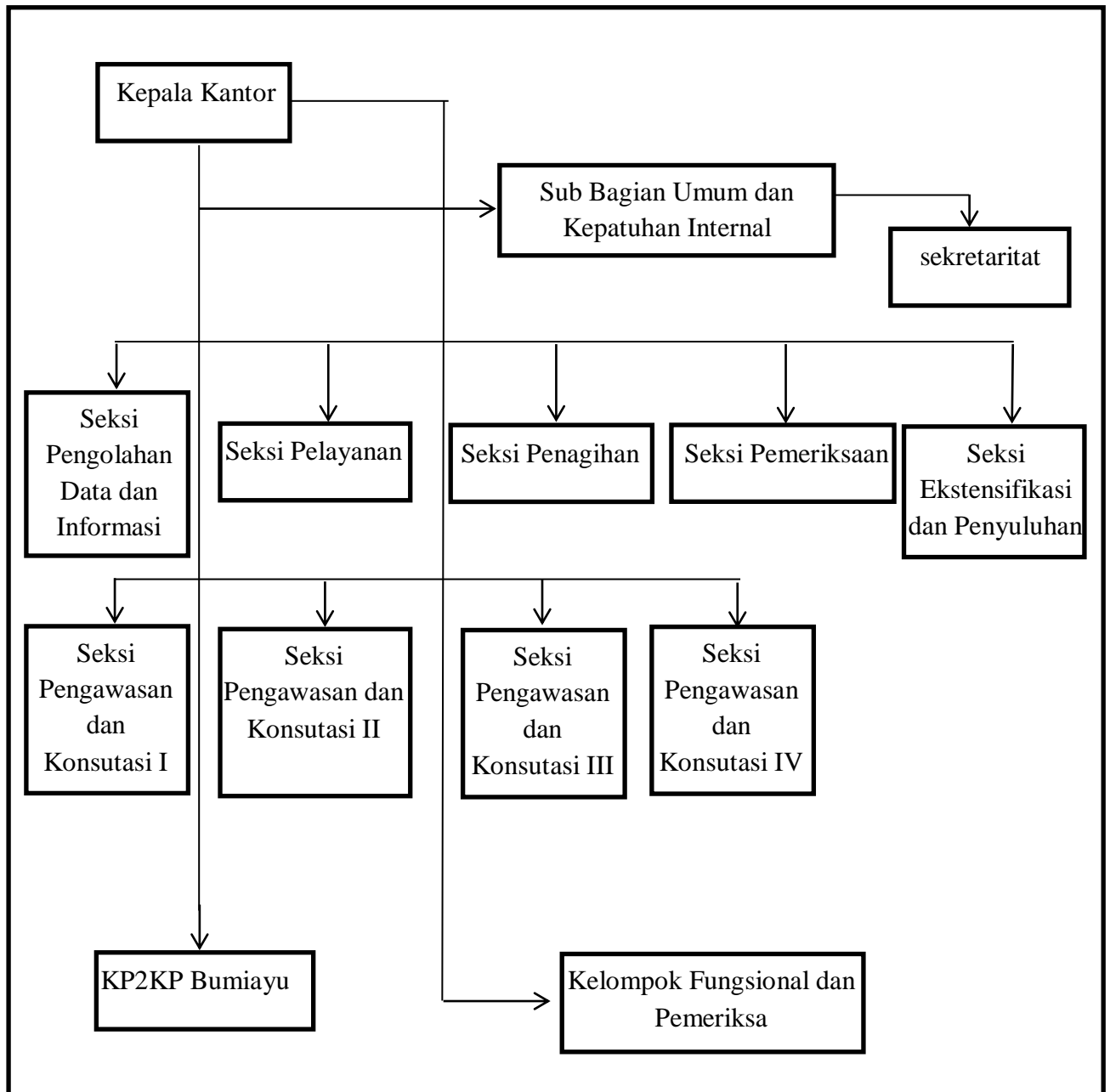
- d) Pelayanan → Memberikan pelayanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman.
- e) Kesempurnaan → Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

4. Struktur Organisasi Kantor KPP Pratama Tegal

Pada KPP Pratama Tegal mempunyai struktur organisasi yang mencakup semua tugas dan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan Surat Peraturan Menteri Keuangan tersebut, sebagaimana halnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama memiliki struktur organisasi yaitu :

- a Kepala Kantor.
- b Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal.
- c Sekretariat.
- d Seksi Pengolahan dan Informasi.
- e Seksi Pelayanan.
- f Seksi Penagihan.
- g Seksi Pemeriksaan.
- h Seksi ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- i Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III, dan IV.
- j KP2KP Bumiayu.
- k Kelompok Fungsional Pemeriksa.

Untuk menjelaskan lebih lanjut berikut gambaran struktur organisasi pada KPP Pratama Tegal



Gambar 4.1

Struktur Organisasi KPP Pratama Tegal

Berikut tugas pokok yang terdapat dalam Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal di tiap-tiap bagiannya sebagai berikut:

- a Seksi Sub Bagian Umum dan Kepatuhan Internal, melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tatausaha dan rumah tangga dan kepatuhan internal.
- b Seksi Pengolahan Data dan Informasi, melakukan pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dokumen, teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling serta penyajian laporan kinerja.
- c Seksi Pelayanan, melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan surat pemberitahuan, penerimaan surat lainnya serta pelaksanaan registrasi wajib pajak.
- d Seksi Penagihan, melakukan urusan penata urusan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan.
- e Seksi Pemeriksaan, melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.
- f Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan mempunyai tugas menambah jumlah wajib pajak maupun objek pajak baru.

- g Seksi Pengawasan dan Konsultasi I, II, III dan IV, melakukan pengawasan keputusan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan/himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi perpajakan, penyusunan profil wajib pajak, analisis kinerja wajib pajak, melakukan rekonsiliasi data waji pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, serta melakukan evaluasi hasil banding.
- h Kelompok Fungsional pemeriksa pajak melakukan tugas teknis pemeriksaan.
- i Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bumiayu mempunyai tugas melayani konsultasi pajak serta menyusun rencana dan melaksanakan penyuluhan kepada wajib pajak.

B. Hasil Penelitian

1. Statistik Deskriptif

Menguji tentang pengaruh machiavellian, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada pemerintah dan status sosial ekonomi terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Objek penelitian yang digunakan peneliti berupa Wajib Pajak orang pribadi sejumlah 100 responden. Adapun karakteristik responden sebagai berikut :

- a Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.

Berdasarkan jenis kelamin responden dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1**Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Laki-laki	56	56%
2.	Perempuan	44	44%
Jumlah		100	100%

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.1 diatas diketahui Analisi Data karakteristik responden menurut jenis kelamin, sebanyak 56% atau 56 responden berjenis kelamin laki-laki dan 44% atau 44 responden berjenis kelamin perempuan.

b. Karakteristik responden berdasarkan usia.

Berdasarkan usia responden dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.2**Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Usia Responden	Jumlah Responden	
	Frekuensi	Persentase
Usia 20 – 30 tahun	45	45%
Usia 31 – 40 tahun	29	29%
Usia 41 – 50 tahun	21	21%
Usia > 50 tahun	5	5%
Jumlah	100	100%

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, karakteristik responden menurut usianya sebesar 45% atau 45 responden berusia 20 sampai 30 tahun, 29% atau 29 responden berusia 31 sampai 40 tahun, 21% atau 21 responden berusia 41 sampai 50 tahun. Sedangkan responden dengan usia lebih dari 50 tahun sebesar 5% atau 5 responden.

c. Karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhir.

Berdasarkan usia responden dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.3

Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir Responden	Jumlah Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	SD	0	0%
2.	SMP/MTS	0	0%
3.	SMA/SMK/MA	38	38%
4.	Diploma	26	26%
5.	Sarjana (S1/S2/S3)	36	36%
Jumlah		100	100%

Sumber : data diolah 2021

Dari Tabel 4.3 terkait karakteristik responden menurut pendidikan terakhir yang ditempuh oleh responden sebanyak 38% atau 38 responden dari 100 responden berpendidikan akhir SMA. Responden dengan pendidikan akhir Diploma sebesar 26% atau 26 responden dari 100 responden. Responden dengan pendidikan sarjana sebesar 36% atau 36 responden dari 100 responden. Sedangkan untuk responden dengan pendidikan akhir SD dan SMP sebanyak 0% atau 0 responden.

d. Karakteristik responden berdasarkan pekerjaan.

Menurut jenis pekerjaan responden dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.4**Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	Wiraswasta	13	13%
2.	Pegawai Swasta	49	49%
3.	PNS	38	38%
Jumlah		100	100%

Sumber : data diolah 2021

Menurut Tabel 4.4 diatas dari 100 responden yang mengisi kuesioner, sebanyak 13% atau 13 responden dari 100 responden yang ada berprofesi sebagai wiraswasta, 49% atau 49 responden berprofesi sebagai pegawai swasta dan 38% atau 38 responden berprofesi sebagai PNS.

e. Karakteristik responden berdasarkan lama kepemilikan NPWP.

Berdasarkan jenis kelamin responden dapat dikelompokkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.5**Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kepemilikan NPWP**

No	Laman Kepemilikan NPWP	Jumlah Responden	
		Frekuensi	Persentase
1.	1 – 5 tahun	44	44%
2.	6 – 10 tahun	23	23%
3.	> 10 tahun	33	33%
Jumlah		100	100%

Sumber : data diolah 2021

Dari Tabel 4.5 diatas dapat diketahui bahwa berdasarkan lama kepemilikan NPWP responden sebanyak 44% atau 44 responden memiliki lama kepemilikan NPWP sekitar 1 – 5 tahun, 23% atau 23

responden sekitar 6 – 10 tahun dan untuk 33% atau 33 responden selama lebih dari 10 tahun.

2. Analisis Data

a Uji Validitas

Uji validas merupakan uji yang dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Untuk pengujian validitas yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode *pearson correlation* atau dengan mengkorelasi skor tiap item pernyataan dengan skor total item pernyataan. Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan antara r hitung dengan Sig.2-tailed. Suatu item pernyataan dikatakan valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ dengan tingkat siginifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%, yang mana menggunakan df (*defree of fredom*) dengan rumusan $df = N-2$. Jadi df yang akan digunakan adalah $100-2 = 98$. Maka menghasilkan nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Berdasarkan hasil uji validitas disajikan dalam tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6

Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
X1 (Machiavellian)	1	0,505	0,1966	Valid
	2	0,387	0,1966	Valid
	3	0,267	0,1966	Valid
	4	0,370	0,1966	Valid
	5	0,346	0,1966	Valid
	6	0,465	0,1966	Valid
	7	0,398	0,1966	Valid
X2 (Teknologi Informasi Perpajakan)	1	0,593	0,1966	Valid
	2	0,785	0,1966	Valid
	3	0,731	0,1966	Valid
	4	0,858	0,1966	Valid

	5	0,765	0,1966	Valid
	6	0,809	0,1966	Valid
X3 (Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak)	1	0,762	0,1966	Valid
	2	0,869	0,1966	Valid
	3	0,801	0,1966	Valid
	4	0,886	0,1966	Valid
X4 (Kepercayaan Kepada Pemerintah)	1	0,871	0,1966	Valid
	2	0,741	0,1966	Valid
	3	0,858	0,1966	Valid
	4	0,836	0,1966	Valid
	5	0,880	0,1966	Valid
X5 (Status Sosial Ekonomi)	1	0,431	0,1966	Valid
	2	0,251	0,1966	Valid
	3	0,453	0,1966	Valid
	4	0,658	0,1966	Valid
	5	0,625	0,1966	Valid
	6	0,382	0,1966	Valid
Y (Persepsi Etika Penggelapan Pajak)	1	0,612	0,1966	Valid
	2	0,686	0,1966	Valid
	3	0,477	0,1966	Valid
	4	0,681	0,1966	Valid
	5	0,674	0,1966	Valid
	6	0,757	0,1966	Valid
	7	0,735	0,1966	Valid
	8	0,490	0,1966	Valid
	9	0,330	0,1966	Valid
	10	0,517	0,1966	Valid
	11	0,490	0,1966	Valid
	12	0,490	0,1966	Valid

Sumber : data diolah 2021

Dari hasil analisis tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 41 item semua nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan nilai signifikansi sebesar 5% atau 0,05.

Dengan demikian disimpulkan bahwa pada tiap item indikator dalam penelitian ini dinyatakan valid.

b Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk mengetahui seberapa konsistenkah suatu kuesioner jika digunakan berulang kali. Dalam penelitian ini, suatu variabel dikatakan reliabel

apabila nilai dari variabel tersebut menunjukkan *cronbach's alpha* > 0,7. Berikut hasil uji reliabilitas penelitian ini dapat dilihat pada tabel.

Tabel 4.7

Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai reabilitas	Standar Koefisien Alfa	Keterangan
Machiavellian (X1)	0,794	0,7	Reliabel
Teknologi Informasi Perpajakan (X2)	0,777	0,7	Reliabel
Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak (X3)	0,791	0,7	Reliabel
Kepercayaan Kepada Pemerintah (X4)	0,784	0,7	Reliabel
Status Sosial Ekonomi (X5)	0,788	0,7	Reliabel
Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Y)	0,844	0,7	Reliabel

Sumber : data diolah 2021

Dari hasil data yang diolah diatas dapat diketahui bahwa semua nilai dari variabel diatas berada > 0,7. Maka kuesioner tersebut dapat dikatakan variabel.

c Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji suatu model regresi, variabel dependen dan independen yang dilakukan dalam suatu penelitian memiliki distribusi yang

normal atau tidak (Fhyel, 2018). Dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov.

Suatu data dikatakan terdistribusi normal apabila nilai signifikansinya $> 0,05$ ($P > 0,05$). Berikut hasil olah data uji normalitas pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.8

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandar dized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std.	5,8789816
	Deviation	9
Most Extreme Differences	Absolute	,090
	Positive	,054
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,046 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,376

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan dari data yang sudah diolah diatas, menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi dengan normal dikarenakan nilai *Exact Sig.(2-tailed)* sebesar $0,376 > 0,05$.

b) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan suatu uji yang digunakan untuk menguji ada tidaknya suatu korelasi antar variabel bebas pada model regresi. Model regresi yang baik ditandai dengan tidak terjadinya korelasi antar variabel bebas (tidak terjadi gejala multikolinearitas).

Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas dengan menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Nilai yang digunakan untuk menguji multikolinearitas sebesar $VIF \leq 10$ dengan nilai $tolerance \geq 0,10$ maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.9

Hasil Uji multikolinearitas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Machiavellian	,964	1,037
Teknologi Informasi		
Perpajakan	,673	1,485
Ketepatan		
Pengalokasian Dana	,573	1,745
Pajak		
Kepercayaan Kepada		
Pemerintah	,442	2,260
Status Sosial Ekonomi	,765	1,307

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan dari data diatas bahwa nilai Tolerance dari masing-masing variabel berada $\geq 0,10$. Sedangkan untuk nilai VIF nya ≤ 10 untuk masing-masing variabelnya. Maka dari itu variabel machiavellian, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada masyarakat dan status sosial ekonomi tidak terjadi gejala multikolinearitas.

c) Uji Heteroskeditas

Untuk menguji ada tidaknya suatu varian yang sama antar pengamatan yang satu dengan yang lain maka digunakan lah uji heteroskeditas.

Untuk pengambilan keputusan uji heteroskeditas jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskeditas. Asumsi yang baik dalam model regresi adalah tidak terjadi masalah heteroskeditas. Berikut merupakan hasil pengolahan data dari uji heteroskeditas yang ditampilkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.10

Hasil Uji Heteroskeditas

Model	Sig.
1 (Constant)	,038
Machiavellian	,252
Teknologi Informasi Perpajakan	,848
Ketepatan Pengalokasian	,514
Kepercayaan Kepada Pemerintah	,783
Status Sosial Ekonomi	,518

Sumber : data diolah 2021

Dari hasil data yang diolah dari uji heteroskeditas diatas menunjukkan bahwa nilai signifikan dari semua variabel berada diatas 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi peristiwa heteroskeditas.

d Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda merupakan suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4.11

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.766	9.026		3.076	.003
Machiavellian	.692	.257	.257	2.699	.008
Teknologi Informasi Perpajakan	.527	.234	.257	2.255	.026
Ketepatan Pengalokasian	-.885	.326	-.335	2.712	.008
Kepercayaan Kepada Pemerintah	-.066	.274	-.034	-.240	.811
Status Sosial Ekonomi	-.139	.319	-.046	-.435	.665

a. Dependent Variable: pengeluaran

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan analisis data dari Tabel 4.11, maka didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = 27.766 + 0,692X_1 + 0,527X_2 + (-0,885)X_3 + (-0,066)X_4 + (-0,139)X_5 + e$$

Persamaan regresi diatas menunjukkan korelasi antara variabel independent dengan variabel dependen secara parsial, dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa

- a) Nilai constanta sebesar 27.766, artinya jika tidak terjadi perubahan variabel machiavellian, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada masyarakat dan status sosial ekonomi adalah 0 maka persepsi etika penggelapan pajak ada sebesar 27.766 satuan.
- b) Nilai koefisien regresi machiavellian sebesar 0,692, artinya jika variabel machiavellian (X_1) meningkat sebesar 1% maka akan berpengaruh pada peningkatan variabel persepsi etika penggelapan pajak (Y) sebesar 0,692 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel machiavellian berkontribusi positif bagi persepsi etika penggelapan pajak.
- c) Nilai koefisien regresi teknologi informasi perpajakan sebesar 0,527 artinya jika variabel teknologi informasi perpajakan (X_2) meningkat sebesar 1% maka akan berpengaruh pada peningkatan variabel persepsi etika penggelapan pajak (Y) sebesar 0,527 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel teknologi informasi perpajakan berkontribusi positif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
- d) Nilai koefisien regresi ketepatan pengalokasian dana pajak sebesar -0,885 artinya jika variabel ketepatan pengalokasian dana pajak (X_3) meningkat sebesar 1% maka akan berpengaruh pada penurunan variabel persepsi etika penggelapan pajak (Y) sebesar -0,885 satuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel ketepatan

pengalokasian dana pajak berkontribusi negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

- e) Nilai koefisien regresi kepercayaan kepada pemerintah sebesar -0,066 artinya jika variabel kepercayaan kepada pemerintah meningkat sebesar 1% maka terjadi penurunan terhadap variabel persepsi etika penggelapan pajak (Y) sebesar -0,066 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepercayaan kepada pemerintah berkontribusi negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.
- f) Nilai koefisien regresi status sosial ekonomi sebesar -0,139 artinya jika variabel status sosial ekonomi meningkat sebesar 1% maka terjadi penurunan terhadap variabel persepsi etika penggelapan pajak (Y) sebesar -0,139 satuan. Hal ini menunjukkan bahwa variabel status sosial ekonomi berkontribusi negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

e Uji Hipotesis

a) Uji F

Uji F merupakan Uji yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki pengaruh yang bekerja secara simultan. Dalam pengujian ini dibandingkanlah antara F_{hitung} dengan F_{tabel} , yang mana jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 diterima dengan signifikansi $< 0,05$.

Tabel 4.12

Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1013,677	5	202,735	4,121	,002 ^b
	Residual	4624,323	94	49,195		
	Total	5638,000	99			

a. Dependent Variable: penggelapan

b. Predictors: (Constant), status, machiavellian, ketepatan, TI, kepercayaan

Sumber : Data diolah 2021

Berdasarkan dari olah data diatas, diketahui bahwa nilai signifikansi pada variabel (X_1), (X_2), (X_3), (X_4) dan (X_5) secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel (Y) adalah $0,002 < 0,05$. Untuk memperoleh F_{tabel} diperlukan menghitung *Degree of Freedom* (df_1) = $k-1$ dan (df_2) = $n-k$. K merupakan jumlah variabel (Independen + dependen) dan n jumlah responden. Maka $df_1 = 5$ ($6-1$) dan $df_2 = 94$ ($100-6$) dengan signifikansi $0,05$ maka nilai F_{tabel} sebesar 2,31.

Diketahui F_{hitung} sebesar 4,121 dan F_{tabel} sebesar 2,31. Dengan begitu $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$, $4,121 > 2,31$. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen dan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

b) Uji t (Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh parsial (sendiri) yang diberikan variabel independen (x) terhadap variabel dependen (Y). Pengujian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *significance level* $0,05$ ($\alpha = 5\%$)

atau dengan membandingkan antara T_{hitung} dengan T_{tabel} . Suatu hipotesis dapat diterima atau mempunyai pengaruh secara parsial jika nilai significance levelnya $< 0,05$ atau $T_{hitung} > T_{tabel}$. Dengan $T_{tabel} = t(\alpha/2 ; n-k-1) = t(0,025 ; 100 - 5 - 1) = 1,989$.

Tabel 4.13

Hasil Uji t (Parsial)

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.766	9.026		3.076	.003
Machiavellian	.692	.257	.257	2.699	.008
Teknologi Informasi Perpajakan	.527	.234	.257	2.255	.026
Ketepatan Pengalokasian	-.885	.326	-.335	-2.712	.008
Kepercayaan Kepada Pemerintah	-.066	.274	-.034	-.240	.811
Status Sosial Ekonomi	-.139	.319	-.046	-.435	.665

a. Dependent Variable: Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan data yang sudah diolah pada Tabel 4.13 dengan mengamati kolom sig dan T_{hitung} bisa dijelaskan sebagai berikut.

i) Pengaruh Variabel Machiavellian Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (H_1)

Variabel machiavellian (X_1) diperoleh $T_{hitung} = 2,699$ dan signifikansi sebesar 0,008 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat T_{tabel} (1,989). Hal ini menunjukkan $2,699 > 1,989$ dan $0,008 < 0,05$, artinya Hipotesis diterima. Dengan ini menunjukkan bahwa Machiavellian memiliki

pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

ii) Pengaruh Variabel Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (H_2)

Variabel teknologi informasi perpajakan (X_2) diperoleh $T_{hitung} = 2,255$ dan signifikansi sebesar 0,026 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat T_{tabel} (1,989). Hal ini menunjukkan $2,255 > 1,989$ dan $0,026 < 0,05$, artinya Hipotesis diterima. Dengan ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi Perpajakan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

iii) Pengaruh Variabel Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (H_3)

Variabel ketepatan pengalokasian dana pajak (X_3) diperoleh $T_{hitung} = -2,712$ dan signifikansi sebesar 0,008 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat T_{tabel} (1,989). Hal ini menunjukkan $-2,712 < 1,989$ dan $0,008 < 0,05$, artinya Hipotesis diterima. Dengan ini menunjukkan bahwa Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

iv) Pengaruh Variabel Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (H_4)

Variabel kepercayaan kepada pemerintah (X_4) diperoleh $T_{hitung} = -0,240$ dan signifikansi sebesar 0,811 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat T_{tabel} (1,989). Hal ini menunjukkan $-0,240 < 1,989$ dan $0,811 > 0,05$, artinya Hipotesis ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa Kepercayaan kepada pemerintah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

v) Pengaruh Variabel Status Sosial dan Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Variabel status sosial ekonomi (X_5) diperoleh $T_{hitung} = -0,435$ dan signifikansi sebesar 0,665 dengan menggunakan batas signifikansi 0,05, didapat T_{tabel} (1,989). Hal ini menunjukkan $-0,435 < 1,989$ dan $0,665 > 0,05$, artinya Hipotesis ditolak. Dengan ini menunjukkan bahwa Status sosial ekonomi tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

c) Koefisien determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) berfungsi untuk mengukur sejauh mana kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nol dan satu. Nilai R^2 yang rendah memiliki kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen dengan terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. berikut hasil dari uji R^2 yang dilakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 4.14

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424 ^a	,180	,136	7,014

a. Predictors: (Constant), status, machiavellian, ketepatan, TI, kepercayaan

Sumber : data diolah 2021

Berdasarkan tabel 4.13 diatas dapat diketahui bahwa nilai koefisien determinasi terdapat pada nilai Adjusted R Square dengan nilai 0,136. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sebesar 13.6% dan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain dan tidak dibahas dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

Berdasarkan hasil dari pengujian-pengujian diatas, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Pengaruh Machiavellian Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel Machiavellian mempunyai koefisien regresi dengan arah positif sebesar 2,699. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik $2,699 > 1,989$ dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,008 < 0,05$. Maka kesimpulannya

bahwa Machiavellian berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak. Semakin tinggi sifat machiavellian berpengaruh positif terhadap tingginya tingkat persepsi etika penggelapan pajak.

Tindakan penggelapan pajak yang didasari faktor eksternal seseorang dapat terjadi dikarenakan desakan dan tekanan yang mendasari tindakan tersebut. Desakan dan tekanan tersebut menyebabkan individu machiavellian melakukan penggelapan pajak karena tidak memperhatikan moralitasnya. Sifat machiavellian ini sering sekali diidentikan dengan perilaku yang tidak baik atau manipulatif. Seseorang dengan sifat machiavellian cenderung untuk memanfaatkan keadaan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan lebih memilih untuk tidak taat terhadap aturan-aturan yang ada. Pelaku machiavellian pada umumnya menggunakan perilaku persuasif demi mencapai tujuan yang diinginkan dan bersifat agresif (Farhan, 2019).

Berdasarkan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putu (2019), Asih & Dwi-yanti (2019) dan danti (2015) yang mana menyatakan bahwa machiavellian berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Berdasarkan data yang diperoleh, tingkat machiavellian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tegal tergolong rendah dan ini berpengaruh terhadap perilaku penggelapan pajak itu sendiri juga rendah.

2. Pengaruh Teknologi Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel teknologi informasi perpajakan mempunyai koefisien regresi linear dengan arah positif sebesar 2,255. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik $2,255 > 1,989$ dengan tingkat signifikansinya $0,026 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif kepada persepsi etika penggelapan pajak. artinya semakin modern, efektif dan efisien suatu teknologi informasi perpajakan berpengaruh terhadap kenaikan tingkat persepsi tentang etika penggelapan pajak.

Upaya memodernisasi yang dilakukan pemerintah sekarang ini menjadi harapan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan maju dan memadainya teknologi informasi perpajakan dapat mengefektifkan waktu yang dibutuhkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2015), Rchaironisyah (2018), Azhari (2015), Ardyaksa (2014) yang menyatakan bahwa teknologi informasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Maka dengan ini semakin baiknya suatu teknologi informasi perpajakan maka akan meningkatkan persepsi etika penggelapan pajak. hal ini dapat dimungkinkan karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan Dirjen Pajak sehingga menyebabkan kurangnya pengetahuan wajib pajak akan teknologi informasi yang disediakan.

3. Pengaruh Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel ketepatan alokasi dana pajak mempunyai koefisien regresi linear dengan arah negatif sebesar -2,712. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik $-2,712 > 1,989$ dengan tingkat signifikansinya $0,026 < 0,05$. Dikarenakan T_{hitung} menghasilkan arah negatif bukan berarti nilainya dibawah 0. Maka nilai T_{hitung} diambil nilai mutlaknya sebesar 2,712. Maka dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi perpajakan berpengaruh negatif kepada persepsi etika penggelapan pajak. Artinya semakin tepat pengalokasian dana pajak yang digunakan maka tingkat persepsi etika penggelapan pajak semakin rendah.

Dikatakan tepat atau tidaknya suatu pengalokasian dana di Tegal dan sekitarnya akan mempengaruhi wajib pajak untuk menggelapkan pajak. karena wajib pajak beranggapan bahwa dana pajak yang dimanfaatkan dipergunakan untuk menciptakan lapangan kerja dan juga dana pajak digunakan untuk peningkatan akses mutu dan pelayanan kesehatan di Tegal dan sekitarnya. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Permatasari, Ingrid (2013), Ardyaksa (2014), Ayu (2009) yang mengatakan bahwa variabel ketepatan pengalokasian memiliki pengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

4. Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel Kepercayaan kepada pemerintah mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif

sebesar -0,240. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik $-0,240 < 1,989$ dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,811 > 0,05$. Maka kesimpulannya bahwa Kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

Penggelapan pajak yang dilakukan masyarakat bergantung pada kepercayaan mereka terhadap pemerintah atas timbal balik dari pajak yang mereka bayarkan. Vogel (1974) dalam Saputra & Andi (2014) mengemukakan bahwa seseorang yang mempunyai kepercayaan besar terhadap pemerintah, cenderung tidak melakukan penggelapan pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Basri (2013) yang mengatakan bahwa kepercayaan kepada otoritas pemerintah tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak. Basri (2013) membuktikan bahwa moral wajib pajak sangat mempengaruhi kepatuhan pajak. Artinya percaya atau tidaknya para wajib pajak kepada pemerintah tidak akan mempengaruhi niat wajib pajak terhadap tindakan penggelapan pajak.

5. Pengaruh Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak.

Berdasarkan hasil uji regresi linear berganda variabel Status sosial ekonomi mempunyai koefisien regresi dengan arah negatif sebesar -0,435. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik $-0,435 < 1,989$ dengan tingkat signifikansinya sebesar $0,665 > 0,05$. Maka kesimpulannya bahwa Status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi etika

penggelapan pajak. Artinya tinggi atau rendahnya suatu status ekonomi sosial wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penggelapan pajak.

Dari data hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa suatu status sosial tidak mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak etis. Semua tindakan yang dilakukan seseorang atau individu bergantung pada lingkungan tempat mereka bersosialisasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nauvalia & Herwinarni (2018) yang mengatakan bahwa status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan mengenai “Pengaruh Machiavellian, Teknologi Informasi Perpajakan, Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak, Kepercayaan Kepada Pemerintah dan Status Sosial Ekonomi Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak”. maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Machiavellian berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Semakin tinggi sifat machiavellian seseorang, maka persepsi wajib pajak atas etika penggelapan pajak juga semakin tinggi, dimana wajib pajak akan cenderung melakukan penggelapan pajak yang dianggap etis oleh wajib pajak karena kepribadiannya yang cenderung mengabaikan moralitas demi keuntungan pribadi.
2. Teknologi informasi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dengan semakin majunya teknologi informasi perpajakan yang tersedia akan mendorong tingginya tingkat tindakan penggelapan pajak.
3. Ketepatan pengalokasian dana pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Dengan semakin tepatnya pengalokasian dana pajak, maka penggelapan pajaknya semakin rendah. Ketika dana pajak dikelola secara benar dan maksimal untuk masyarakat dan masyarakat menikmati hasil pengelolaan dana tersebut,

maka wajib pajak akan cenderung menghindari tindakan penggelapan pajak.

4. Kepercayaan kepada pemerintah tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Karena tindakan penggelapan pajak lebih cenderung kepada moral yang dimiliki wajib pajak bukan kepada tingkat kepercayaan wajib pajak kepada pemerintah.
5. Status sosial ekonomi tidak berpengaruh terhadap persepsi etika penggelapan pajak. Semakin tinggi suatu status sosial ekonomi yang disandang seseorang tidak mempengaruhi tindakan penggelapan pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan peneliti kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai berikut :

1. Bagi para wajib pajak disarankan untuk selalu bersikap etis dalam setiap keadaan supaya terhindar dari perbuatan yang tentunya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.
2. Bagi KPP Pratama Tegal diharapkan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai teknologi informasi perpajakan serta memberikan pengawasan terhadap wajib pajak supaya tidak memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk melakukan tindakan penggelapan pajak.
3. Bagi KPP Pratama Tegal dan Pemerintah diharapkan untuk bisa mengalokasikan dana pajak dengan tepat, benar dan transparan. Kemanfaatan pajak harus benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat.

4. Pemerintah harus bisa membangun kepercayaan kepada masyarakat dalam berbagai kebijakan publik dan harus memihak kepada kepentingan masyarakat umum.
5. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat lebih baik lagi untuk menentukan variabel independen yang lebih berpengaruh terhadap variabel dependennya.

C. Keterbatasan

Dalam melakukan suatu penelitian tidak halnya mengalami beberapa keterbatasan. Berikut beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti selama melakukan penelitian :

1. Pada kuesioner penelitian ini, jawaban responden (wajib pajak) terkadang tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
2. Pandemi COVID-19. Bagi peneliti tentu membutuhkan interaksi secara langsung kepada responden untuk menyebarkan kuesioner. Tetapi disaat kondisi pandemi COVID-19 ini memaksa peneliti untuk tidak berinteraksi secara langsung.
3. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini; machiavellian, teknologi informasi perpajakan, ketepatan pengalokasian dana pajak, kepercayaan kepada pemerinah dan status sosial hahanya mampu menjelaskan variabel persepsi etika penggelapan pajak sebesar 13,6% .

DAFTAR PUSTAKA

- Angelina, M., & Mangoting, Y. (2014). Pengaruh Pandangan Sosial , Usia , dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Praktik Penggelapan Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 4(1), 1–9.
- Ardyaksa, kiswanto theo kusuma. (2014). Pengaruh Keadilan, Tarif Pajak, Ketepatan Pengalokasian, Kecurangan, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Tax Evasion. *Accounting Analysis Journal*, 3(4), 475–484. <https://doi.org/10.15294/aaj.v3i4.4209>
- Aryani, D. S., Tetap, D., Fakultas, Y., & Palembang, U. T. (2018). *TERHADAP PENERAPAN SISTEM E-FILLING DI UNIVERSITAS TRIDINANTI Oleh*. 356–367.
- Asih, N. P. S. M., & Dwiyanti, K. T. (2019). Pengaruh Love Of Money, Machiavellian, dan Equity Sensitivity Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *E-Jurnal Akuntansi*, 26, 1412. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p21>
- ayu. (n.d.).
- Ayu, S. D. (2009). *PERSEPSI WAJIB PAJAK : DAMPAK PERTENTANGAN DIAMETRAL PADA TAX EVASION WAJIB PAJAK DALAM ASPEK KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, KEADILAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN, TEKNOLOGI SISTEM PERPAJAKAN, DAN KECENDERUNGAN PERSONAL (STUDI WAJIB PAJAK ORANG PRIBAD*.
- Azhari, A., Basri, Y., & Silaen, C. (2015). Pengaruh Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Teknologi Dan Informasi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 33904.
- Aziz, T. Ibnu. (2015). *PENGARUH LOVE OF MONEY DAN MACHIAVELLIAN TERHADAP PERSEPSI ETIS MAHASISWA AKUNTANSI. IV*.
- Basri, Y. M. (2013). *kepercayaan dan kekuasaan dalam otoritas pemerintah sebagai determinan tingkat kepatuhan pajak dan penggelapan pajak*. 1–31.
- danti, dwi suci rahma. (2015). Mampukah Religiusity Memoderasi Pengaruh Machiavellian Terhadap Tax Evasion. *Pengaruh Harga Diskon Dan Persepsi Produk Terhadap Nilai Belanja Serta Perilaku Pembelian Konsumen*, 7(9), 27–44.
- Fajarwati, D. M. dan D. (2016). *PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGARUH KEADILAN, SISTEM PERPAJAKAN DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENGGELOPAN PAJAK (Survey terhadap UMKM di Bekasi)*. 7(1).

- Fajrin, I. (2019). pengaruh keterkaitan religiusitas, sosial ekonomi dan sikap love of money dalam etika penggelapan pajak wajib pajak UMKM di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. *Jurnal Teknodik*, 2. <https://doi.org/10.32550/teknodik.v0i0.601>
- Farhan, M., Helmy, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Machiavellian Dan Love Of Money Terhadap Persepsi Etika Penggelapan Pajak Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(1), 470–486.
- Fatmawati, L. (2018). PENGARUH KEADILAN, KETEPATAN PENGALOKASIAN, MORAL PAJAK DAN MONEY ETHICS TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK. In 2018 (Issue 2). <https://doi.org/10.20961/ge.v4i1.19180>
- Fhyel, V. G. (2018). *Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan, Pemeriksaan Pajak, dan Tarif Pajak Terhadap Penggelapan Pajak*.
- Fitriyanti, I., Fauzi, A., & Armeliza, D. (2017). DOI Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 12 No . 01 , Tahun 2017 DOI Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi Volume 12 No . 01 , Tahun 2017. *Ilmiah Wahana Akutansi*, 12(01), 84–104.
- Friskianti, Y. (2014). *Accounting Analysis Journal*. 3(4), 457–465.
- Khoiroh, N. (2017). Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Gandaria. *Skripsi*, 1–173.
- Madjid, S., & Syafi'ah Rahayu, I. (2019). Pengaruh Tarif Pajak, Ketetapan Pengalokasian Pajak dan Keadilan Pajak terhadap Tax Evasion oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. *Majalah Sainstekes*, 5(2), 91–100. <https://doi.org/10.33476/ms.v5i2.930>
- McGee, R. W., & Jain, R. K. (2012). The ethics of tax evasion: A study of Indian opinion. *The Ethics of Tax Evasion: Perspectives in Theory and Practice*, 9781461412(January 2011), 321–336. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-1287-8_20
- Mufti, M., Gatara, A. A. S., Afrilia, A., & Mutiarawati, R. (2020). Analisis pengukuran tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah: Kekuatan bagi penanganan Covid-19 berbasis masyarakat. *Lp2M*, 1–13.
- Munafiäh, A. (2020). *PENGARUH DISKRIMINASI PAJAK , STATUS SOSIAL EKONOMI , PEMAHAMAN PAJAK , DAN SISTEM (STUDI EMPIRIS WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI*.
- Nauvalia, F. A., & Herwinarni, Y. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pemahaman Perpajakan, Status Sosial Ekonomi dan Love Of Money Terhadap Persepsi

- Penggelapan Pajak. *Permana : Jurnal Perpajakan, Manajemen, Dan Akuntansi*, 10(1), 130–141. <https://doi.org/10.24905/permana.v10i1.73>
- Noviyana, E. (2019). *karakteristik personal auditor dan perilaku etis terhadap kinerja auditor*.
- Paramita, M., & Budiasih, I. (2016). Pengaruh Sistem Perpajakan, Keadilan, Dan Teknologi Perpajakan Pada Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 17(2), 1030–1056.
- Pemayun, A. A. G. A. W. (2018). *No Title*. 23, 1600–1628.
- Permatasari, Inggrid, H. L. (2013). MINIMALISASI TAX EVASION MELALUI TARIF PAJAK , (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 2(2), 1–10.
- Putu, N., Murtining, S., & Dwiyaniti, K. T. (2019). Pengaruh love of money , machiavellian , dan equity sensitivity terhadap persepsi etika penggelapan pajak (Tax Evasion) FakultasEkonomirdan BisnisaUniversitasaPendidikan Nasionalf (Undiknas), Bali , Indonesia AB. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26, 1412–1435.
- Rahim, S. (n.d.). *Pengaruh ketentuan tarif pajak badan, ketepatan pemanfaatan pajak dan sanksi pajak terhadap penggelapan pajak*.
- Ramadhani, tri suci. (2015). PENGARUH SIFAT MACHIAVELLIAN, LOCUS OF CONTROL, DAN EQUITY SENSITIVITY TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DENGAN KEPUTUSAN ETIS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *JOMFekom*, 2.
- Rchaironisyah, renadya wiyani. (2018). Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak orang pribadi mengenai etika atas penggelapan pajak (tax evasion). *Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang*.
- Saputra, W., & Andi. (2014). Pengaruh Kepercayaan, Moral Dan Kekuasaan Pemerintah Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak Dan Penggelapan Pajak Pada Kpp Pratama Kebon Jeruk Dua. *Jurnal Ilmiah Niagara*, 8(1), 1–12.
- Sari, T. maya. (2015). *Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak , dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion (Studi Kasus pada KPP Pratama Semarang Candisari)*.
- Silaen, C. (2015). PENGARUH SISTEM PERPAJAKAN, DISKRIMINASI, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELOPAN PAJAK (TAX EVASION). *JOMFekom*, 2.

- Suminarsasi, W. S. (2012). TERHADAP PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (TAX EVASION) Wahyu Suminarsasi Universitas Gadjah Mada Supriyadi Universitas Gadjah Mada Fairness , Tax System , Discrimination , Ethical Perceptions of Taxpayer , tax. *SNA 15 Banjarmasin*, 1(2 (oktober)), 0–29.
- Ulfa, A., Desmiyawati, D., & Lukman, A. (2015). PENGARUH KEMUNGKINAN TERDETEKSINYA KECURANGAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI PERPAJAKAN, DAN KEPERCAYAAN PADA OTORITAS PEMERINTAH TERHADAP PENGGELAPAN PAJAK (Studi Empiris Pada Orang Pribadi Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Senapelan Pekanbaru). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 2(2), 34096.
- Utami, P. D., & Helmy, H. (2016). Pengaruh Tarif Pajak, Teknologi Informasi Perpajakan, dan Keadilan Sistem Terhadap Penggelapan Pajak: Studi Empiris pada WPOP yang Melakukan Usaha di Kota Padang. *Wahana Riset Akuntansi*, 4(2), 893–904.
- Wardani, dewi kusuma. (2020). Tarif pajak terhadap penggelapan pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas PGRI Kediri*, 5(1), 43–49.

DAFTAR LAMPIRAN

A. Output Uji Validitas a) Machiavellian (X1)

		Correlations							
		X1.1	X1.2	x1.3	x1.4	x1.5	x1.6	X1.7	x1.total
X1.1	Pearson Correlation	1	,172	,082	,031	-,073	,136	-,008	,505**
	Sig. (2-tailed)		,088	,419	,759	,468	,176	,940	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	,172	1	,272**	,152	-,034	-,001	-,229*	,387**
	Sig. (2-tailed)	,088		,006	,130	,739	,992	,022	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x1.3	Pearson Correlation	,082	,272**	1	,126	-,161	-,077	-,175	,267**
	Sig. (2-tailed)	,419	,006		,212	,109	,444	,082	,007
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x1.4	Pearson Correlation	,031	,152	,126	1	,018	-,051	-,198*	,370**
	Sig. (2-tailed)	,759	,130	,212		,859	,615	,048	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x1.5	Pearson Correlation	-,073	-,034	-,161	,018	1	-,057	,154	,346**
	Sig. (2-tailed)	,468	,739	,109	,859		,573	,126	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x1.6	Pearson Correlation	,136	-,001	-,077	-,051	-,057	1	,265**	,465**
	Sig. (2-tailed)	,176	,992	,444	,615	,573		,008	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100
X1.7	Pearson Correlation	-,008	-,229*	-,175	-,198*	,154	,265**	1	,398**
	Sig. (2-tailed)	,940	,022	,082	,048	,126	,008		,000

	N	100	100	100	100	100	100	100	100
x1.total	Pearson Correlation	,505**	,387**	,267**	,370**	,346**	,465**	,398**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,007	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100	100

b) Teknologi Informasi Perpajakan

Correlations

		x2.1	x2.2	x2.3	x2.4	x2.5	x2.6	x2.total
x2.1	Pearson Correlation	1	,513**	,175	,395**	,266**	,370**	,593**
	Sig. (2-tailed)		,000	,082	,000	,007	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x2.2	Pearson Correlation	,513**	1	,442**	,619**	,538**	,471**	,785**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x2.3	Pearson Correlation	,175	,442**	1	,694**	,440**	,531**	,731**
	Sig. (2-tailed)	,082	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x2.4	Pearson Correlation	,395**	,619**	,694**	1	,552**	,592**	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x2.5	Pearson Correlation	,266**	,538**	,440**	,552**	1	,720**	,765**
	Sig. (2-tailed)	,007	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
x2.6	Pearson Correlation	,370**	,471**	,531**	,592**	,720**	1	,809**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100

x2.total	Pearson Correlation	,593**	,785**	,731**	,858**	,765**	,809**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

c) Ketepatan Pengalokasian Dana Pajak

Correlations						
		x3.1	x3.2	x3.3	x3.4	x3.total
x3.1	Pearson Correlation	1	,526**	,531**	,536**	,762**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
x3.2	Pearson Correlation	,526**	1	,568**	,749**	,869**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100
x3.3	Pearson Correlation	,531**	,568**	1	,604**	,801**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100
x3.4	Pearson Correlation	,536**	,749**	,604**	1	,886**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100
x3.total	Pearson Correlation	,762**	,869**	,801**	,886**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100

d) Kepercayaan Kepada Pemerintah

Correlations							
		x4.1	x4.2	x4.3	x4.4	x4.5	x4.total
x4.1	Pearson Correlation	1	,734**	,712**	,578**	,688**	,871**
	Sig. (2-tailed)		,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x4.2	Pearson Correlation	,734**	1	,589**	,395**	,508**	,741**
	Sig. (2-tailed)	,000		,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x4.3	Pearson Correlation	,712**	,589**	1	,641**	,669**	,858**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000		,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x4.4	Pearson Correlation	,578**	,395**	,641**	1	,771**	,836**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100
x4.5	Pearson Correlation	,688**	,508**	,669**	,771**	1	,880**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100
x4.total	Pearson Correlation	,871**	,741**	,858**	,836**	,880**	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100

e) Status Sosial Ekonomi

Correlations

		X5.1	X5.2	X5.3	X5.4	X5.5	X5.6	X5TOT AL
X5.1	Pearson Correlation	1	-,468**	,002	,367**	,406**	,385**	,431**
	Sig. (2- tailed)		,000	,981	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.2	Pearson Correlation	-,468**	1	,156	-,013	-,117	-,303**	,251*
	Sig. (2- tailed)	,000		,122	,898	,247	,002	,012
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.3	Pearson Correlation	,002	,156	1	,149	,071	,106	,453**
	Sig. (2- tailed)	,981	,122		,138	,481	,292	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.4	Pearson Correlation	,367**	-,013	,149	1	,453**	,239*	,658**
	Sig. (2- tailed)	,000	,898	,138		,000	,017	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.5	Pearson Correlation	,406**	-,117	,071	,453**	1	,402**	,625**
	Sig. (2- tailed)	,000	,247	,481	,000		,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5.6	Pearson Correlation	,385**	-,303**	,106	,239*	,402**	1	,382**
	Sig. (2- tailed)	,000	,002	,292	,017	,000		,000
	N	100	100	100	100	100	100	100
X5TOT AL	Pearson Correlation	,431**	,251*	,453**	,658**	,625**	,382**	1
	Sig. (2- tailed)	,000	,012	,000	,000	,000	,000	
	N	100	100	100	100	100	100	100

f) Persepsi Etika Penggelapan Pajak

Correlations

		y.1	y.2	y.3	y.4	y.5	y.6	y.7	y.8	y.9	y.10	y.11	y.12	ytotal
y.1	Pearson Correlation	1	,541**	,029	,558**	,542**	,608**	,527**	,382**	-,176	,010	,031	-,064	,612**
	Sig. (2-tailed)		,000	,776	,000	,000	,000	,000	,000	,081	,921	,757	,530	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.2	Pearson Correlation	,541**	1	,081	,679**	,481**	,682**	,608**	,349**	-,071	,095	,057	,067	,686**
	Sig. (2-tailed)	,000		,424	,000	,000	,000	,000	,000	,483	,346	,571	,509	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.3	Pearson Correlation	,029	,081	1	,036	,123	,140	,169	-,051	,504**	,461**	,505**	,583**	,477**
	Sig. (2-tailed)	,776	,424		,724	,224	,164	,092	,617	,000	,000	,000	,000	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.4	Pearson Correlation	,558**	,679**	,036	1	,583**	,662**	,575**	,409**	-,161	,112	,065	,057	,681**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,724		,000	,000	,000	,000	,109	,266	,521	,574	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.5	Pearson Correlation	,542**	,481**	,123	,583**	1	,570**	,607**	,489**	-,158	,121	,054	,102	,674**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,224	,000		,000	,000	,000	,116	,229	,595	,314	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.6	Pearson Correlation	,608**	,682**	,140	,662**	,570**	1	,719**	,402**	-,084	,106	,095	,132	,757**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,164	,000	,000		,000	,000	,406	,293	,348	,190	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.7	Pearson Correlation	,527**	,608**	,169	,575**	,607**	,719**	1	,561**	-,090	,067	,041	,095	,735**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,092	,000	,000	,000		,000	,371	,508	,686	,347	,000
	N	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
y.8	Pearson Correlation	,382**	,349**	-,051	,409**	,489**	,402**	,561**	1	-,172	-,011	-,095	-,084	,490**
	Sig. (2-tailed)	,000	,000	,617	,000	,000	,000	,000		,088	,915	,345	,404	,000

B. Output Uji Reliabilitas

Item-Total Statistics				
	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item- Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	286,41	651,194	,159	,798
Y.2	286,46	648,655	,216	,796
Y.3	284,43	637,035	,488	,792
Y.4	286,29	645,804	,313	,795
Y.5	286,41	647,315	,247	,796
Y.6	286,22	643,446	,278	,795
Y.7	286,14	647,839	,224	,796
Y.8	286,86	666,364	-,087	,802
Y.9	284,74	639,043	,412	,793
Y.10	284,48	640,939	,413	,793
Y.11	284,46	637,544	,516	,792
Y.12	284,42	641,357	,446	,793
YTOTAL	250,96	501,675	,307	,844
X1.1	286,24	649,255	,210	,797
X1.2	285,78	654,153	,178	,797
X1.3	284,20	647,859	,366	,795
X1.4	285,08	653,145	,154	,798
X1.5	286,23	648,906	,234	,796
X1.6	286,80	664,323	-,054	,801
X1.7	286,49	668,616	-,120	,804
X1TOTAL	268,26	611,669	,311	,794
X2.1	284,36	650,798	,280	,796
X2.2	284,51	642,454	,490	,793
X2.3	284,56	640,087	,527	,792
X2.4	284,50	631,687	,659	,790
X2.5	284,46	645,806	,435	,794
X2.6	284,32	639,068	,549	,792
X2TOTAL	262,91	546,850	,595	,777
X3.1	285,07	653,096	,227	,797
X3.2	285,30	648,556	,282	,796
X3.3	284,85	645,846	,406	,794
X3.4	285,44	638,047	,484	,792
X3TOTAL	274,38	603,147	,366	,791
X4.1	284,64	641,485	,475	,793
X4.2	284,48	647,444	,358	,795
X4.3	284,77	639,068	,502	,792
X4.4	285,11	629,432	,565	,790
X4.5	284,95	638,230	,482	,792
X4.TOTAL	268,91	556,224	,500	,784
X5.1	284,34	643,338	,402	,794
X5.2	286,06	666,966	-,097	,803
X5.3	284,55	661,199	,014	,800
X5.4	284,20	643,859	,439	,794
X5.5	284,26	646,316	,413	,794
X5.6	284,24	647,497	,425	,795
X5TOTAL	261,67	603,375	,425	,788

C. Output Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}		
	Mean	,0000000
	Std. Deviation	5,87898169
Most Extreme Differences		
	Absolute	,090
	Positive	,054
	Negative	-,090
Test Statistic		,090
Asymp. Sig. (2-tailed)		,046 ^c
Exact Sig. (2-tailed)		,376
Point Probability		,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

D. Output Uji Multikolinearitas dan Uji Heteroskeditas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	27,766	9,026		3,076	,003		
X1TOTAL	,692	,257	,257	2,699	,008	,964	1,037
X2TOTAL	,527	,234	,257	2,255	,026	,673	1,485
X3TOTAL	-,885	,326	-,335	-2,712	,008	,573	1,745
X4.TOTAL	-,066	,274	-,034	-,240	,811	,442	2,260
X5TOTAL	-,139	,319	-,046	-,435	,665	,765	1,307

E. Output Analisis Linear Berganda dan Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	27.766	9.026		3.076	.003
Machiavellian	.692	.257	.257	2.699	.008
Teknologi Informasi Perpajakan	.527	.234	.257	2.255	.026
Ketepatan Pengalokasian	-.885	.326	-.335	-2.712	.008
Kepercayaan Kepada Pemerintah	-.066	.274	-.034	-.240	.811
Status Sosial Ekonomi	-.139	.319	-.046	-.435	.665

a. Dependent Variable: pengeluaran

F. Output Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1013,677	5	202,735	4,121	,002 ^b
Residual	4624,323	94	49,195		
Total	5638,000	99			

a. Dependent Variable: penggelapan

b. Predictors: (Constant), status, machiavellian, ketepatan, TI, kepercayaan

G. Output Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,424 ^a	,180	,136	7,014

a. Predictors: (Constant), status, machiavellian, ketepatan, TI, kepercayaan